

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BEASISWA ANAK NELAYAN
YAYASAN PANGKAI MEUREUNO ANEUK NELAYAN (YPMAN)
DI KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
MELA SARI
NIM. 170802074**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2021 M / 1442 H

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BEASISWA ANAK NELAYAN
YAYASAN PANGKAI MEUREUNO ANEUK NELAYAN (YPMAN) DI
KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

MELA SARI

NIM. 170802074

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk dimunaqasyahkan oleh :

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.

NIDN. 2017117904

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN BEASISWA ANAK
NELAYAN YAYASAN PANGKAI MEUREUNO ANEUK
NELAYAN (YPMAN) DI KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
25 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Sekretaris,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 20171117904

Penguji I,



Dr. Dahlawi, M.Si.
NIP.196201011985031019

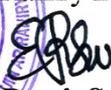
Penguji II,



Siti Nur Zalikha, M. Si.
NIP. 199002282018032001

Mengetahui
Dekan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mela Sari
NIM : 170802074
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Aceh Besar 02 Februari 2000
Alamat : Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2021



Yang Menyatakan,


MELA SARI

NIM. 170802074

ABSTRAK

Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) merupakan yayasan yang didirikan oleh Lembaga Hukum Adat Laot Panglima Laot Aceh berdasarkan Akta Notaris No. 62 tanggal 28 November 2001, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan di Aceh. Sumber dana utama yayasan ini dari dana hibah pelelangan kapal Thailand yang masuk ke perairan Aceh sebesar 11 miliar lebih yang dialokasikan sepenuhnya untuk beasiswa anak nelayan. Dengan dana yang begitu banyak tentu perlu pengelolaan yang bagus untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana serta perlu penerapan prinsip transparansi di dalamnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan beasiswa anak nelayan di kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar serta bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan berbagai dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya beasiswa anak nelayan YPMAN di Desa Saney Kecamatan Lhoong masih kurang bagus, walaupun terkait prosedur dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan YPMAN dipaparkan dengan jelas oleh sekretaris YPMAN serta panglima laot lhok di Desa Saney. Namun dalam penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan beasiswa belum sepenuhnya diterapkan hal ini dibuktikan dengan belum adanya penyediaan informasi terkait beasiswa Anak Nelayan secara jelas, dan tidak ada website panglima laot atau YPMA yang bisa di akses oleh masyarakat, serta minim nya partisipasi masyarakat di dalamnya .

Kata kunci: *Transparansi., YPMAN, Beasiswa.*



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Yusmadi dan Ibunda Yuliani yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat saya berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan

tanda bakti saya. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, Mak Ha, Pak Ha, Nek Rani, Om meren, Sukma, Adik Nisa dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.

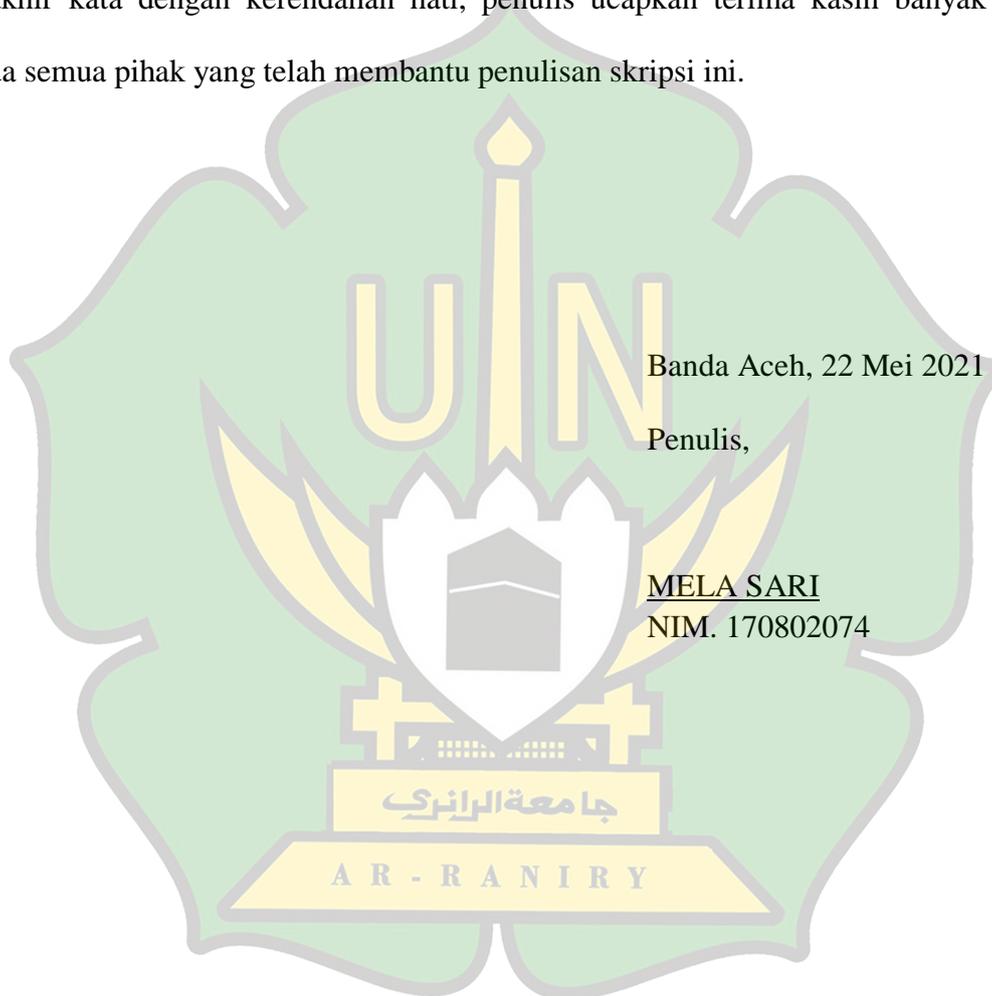
Izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Eka Januar, M.Soc.,Sc. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat penulis ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Bapak Eka Januar, M.Soc.,Sc. dan Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Dian Rubianti selaku Dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian

Administrasi Negara dan Mata Kuliah Seminar Administrasi Negara yang telah memotivasi, membimbing dan memberi arahan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Serta seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepada kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawannya dan kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh karyawannya, yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis Zakia, Nani, Ayu, Delia yang mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka. Dan kepada sahabat seperjuangan yang bersatu dalam keluarga Swag Partners (Sukma, Rika, Fiza, Nepa, Depi, Okta, Nurul, Nufus, Jihan, Aura, Nusrat, Reza, Hafizam, Furqan, Mahfud, Zulfa, Luthfi). adek kos Krisma dan teman-teman leting 2017 Ilmu Administrasi Negara lainnya.
10. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UIN Ar-Raniry dan KOHATI FISIP UIN Ar-Raniry, yang merupakan organisasi tempat peneliti berproses dan sebagai wadah untuk mengabdikan diri sebagai kader umat dan kader bangsa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Penjelasan Istilah.....	5
1.7. Metodologi Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	14
2.2. Teori Pengelolaan.....	17
2.2.1. Pengertian Pengelolaan.....	17
2.2.2. Pengertian Pengelolaan Keuangan.....	17
2.2.3. Prinsip Pengelolaan Keuangan.....	19
2.3. Teori Transparansi.....	21
2.3.1. Pengertian Transparansi.....	21
2.3.2. Prinsip Transparansi.....	23
2.3.3. Indikator Transparansi.....	24
2.4. Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	26
2.4.1 Sumber Dana Yayasan pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	26
2.5. Beasiswa Anak Nelayan.....	27
2.6. Kerangka Pemikir.....	28

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
3.1.1 Sejarah Desa Saney	29
3.1.2 Letak Geografis	31
3.1.3 Kondisi Demografis dan Kependudukan Desa.....	32
3.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pembahasan Hasil Penelitian.....	39
4.1.1. Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar	39
4.1.1.1. Sejarah Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	39
4.1.1.2. Legalitas Pendirian Yayasan Yayasan pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)	40
4.1.1.3. Susunan Kepengurusan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	41
4.1.1.4. Visi dan Misi Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	43
4.1.1.5. Rencana kerja Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) 2017-2020	43
4.1.1.6. Prosedur Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	44
4.1.1.7. Pengelolaan Keuangan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)	53
4.1.2. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.....	60
4.1.2.1. Penyediaan informasi yang jelas	61
4.1.2.2. Kemudahan akses informasi	64
4.1.2.3. Menyusun Mekanisme Pengaduan	67
4.1.2.4. Meningkatkan Arus Informasi.....	68
4.1.3. Harapan Segenap Stakeholder Yang Terlibat Dalam Beasiswa Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).....	70

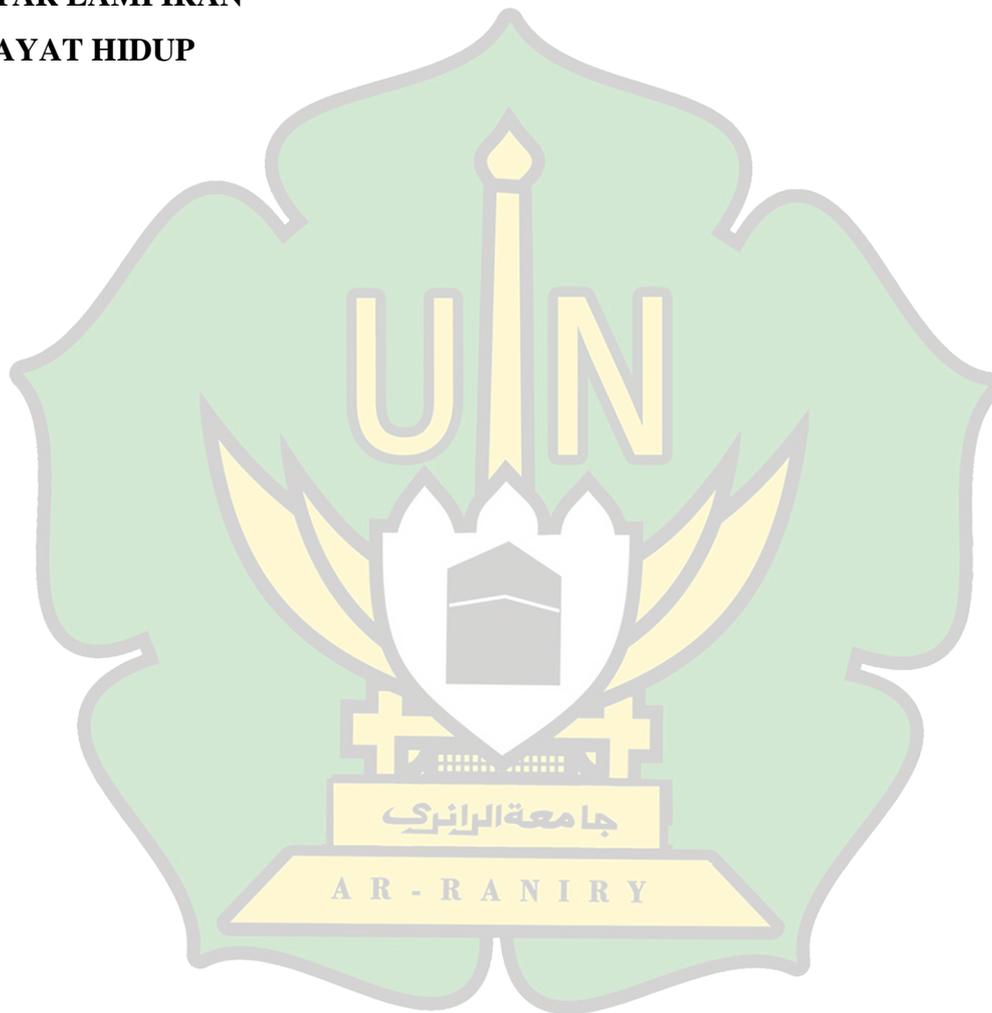
BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

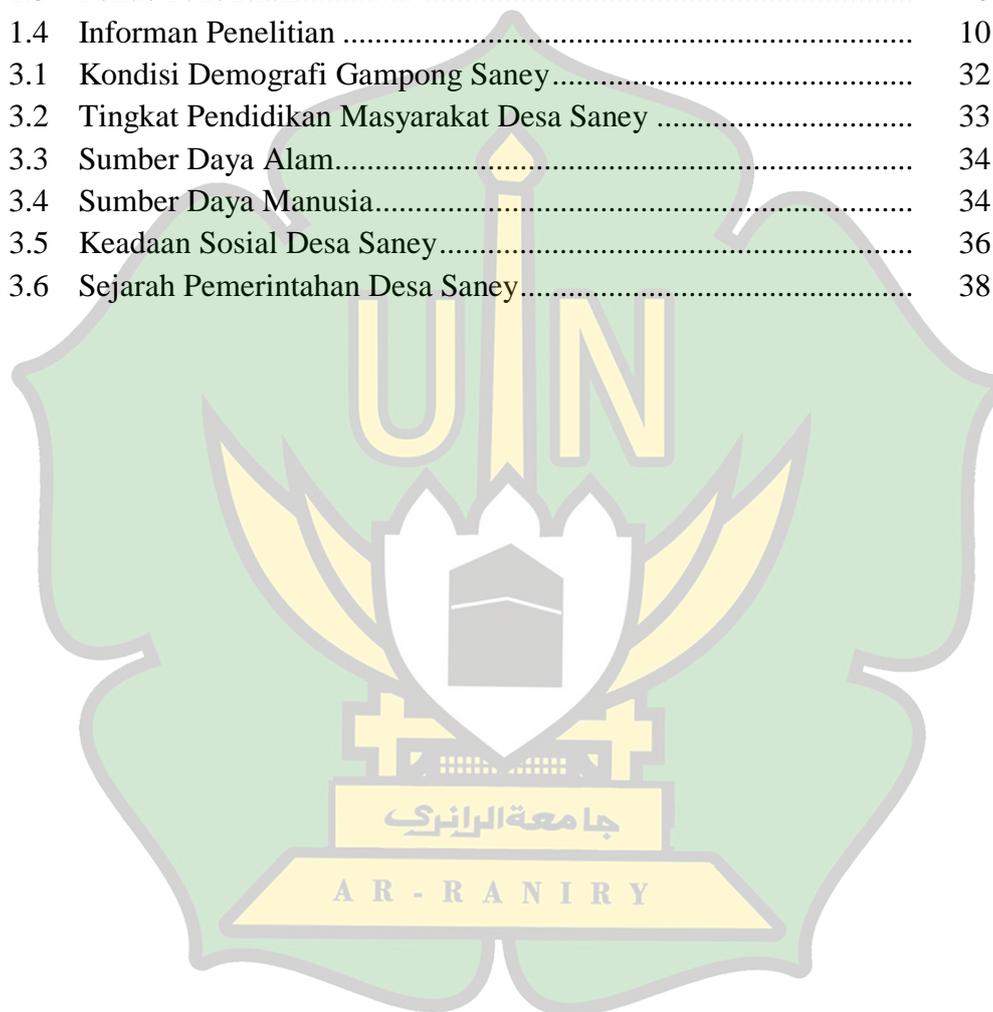
DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



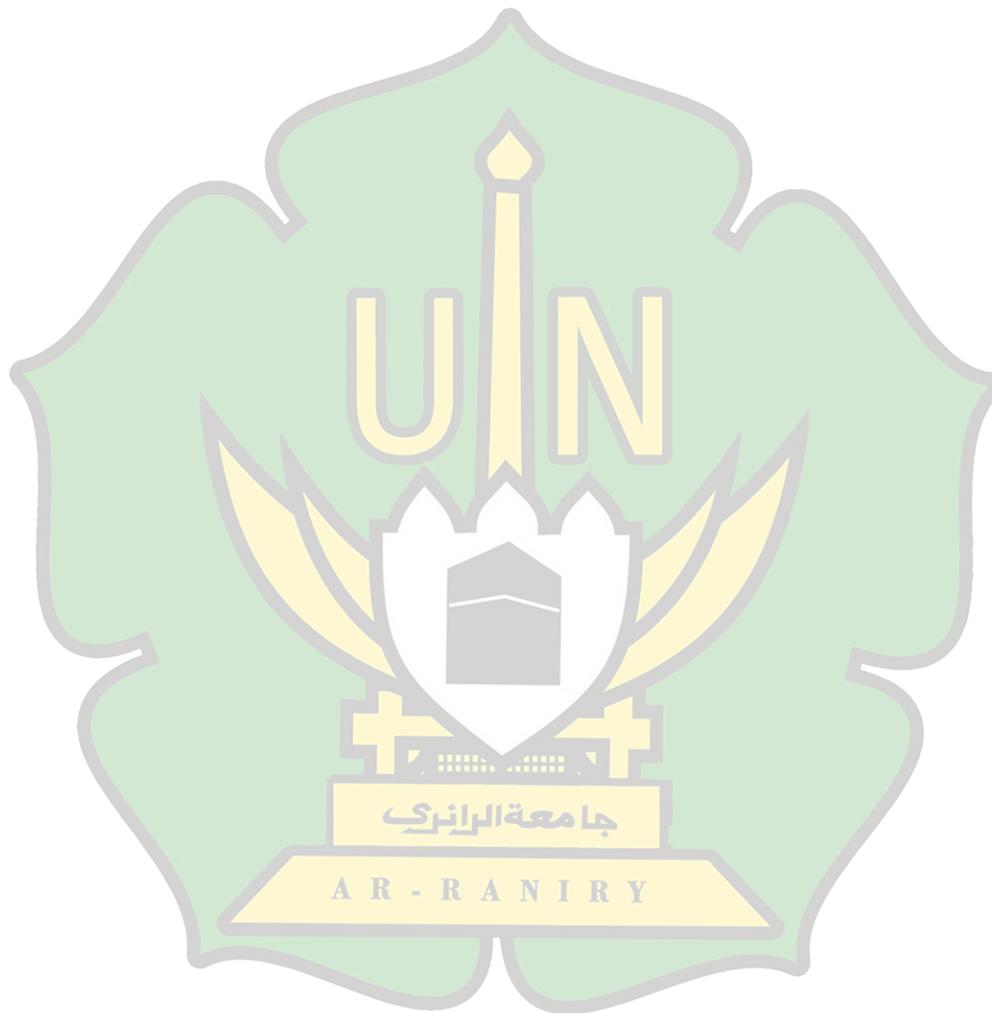
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Beasiswa Reguler Mulai Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2017	2
Tabel 1.2	Program Beasiswa Khusus Mulai Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2017.....	2
Tabel 1.3	Fokus Penelitian.....	8
Tabel 1.4	Informan Penelitian	10
Tabel 3.1	Kondisi Demografi Gampong Saney	32
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Saney	33
Tabel 3.3	Sumber Daya Alam.....	34
Tabel 3.4	Sumber Daya Manusia.....	34
Tabel 3.5	Keadaan Sosial Desa Saney.....	36
Tabel 3.6	Sejarah Pemerintahan Desa Saney.....	38



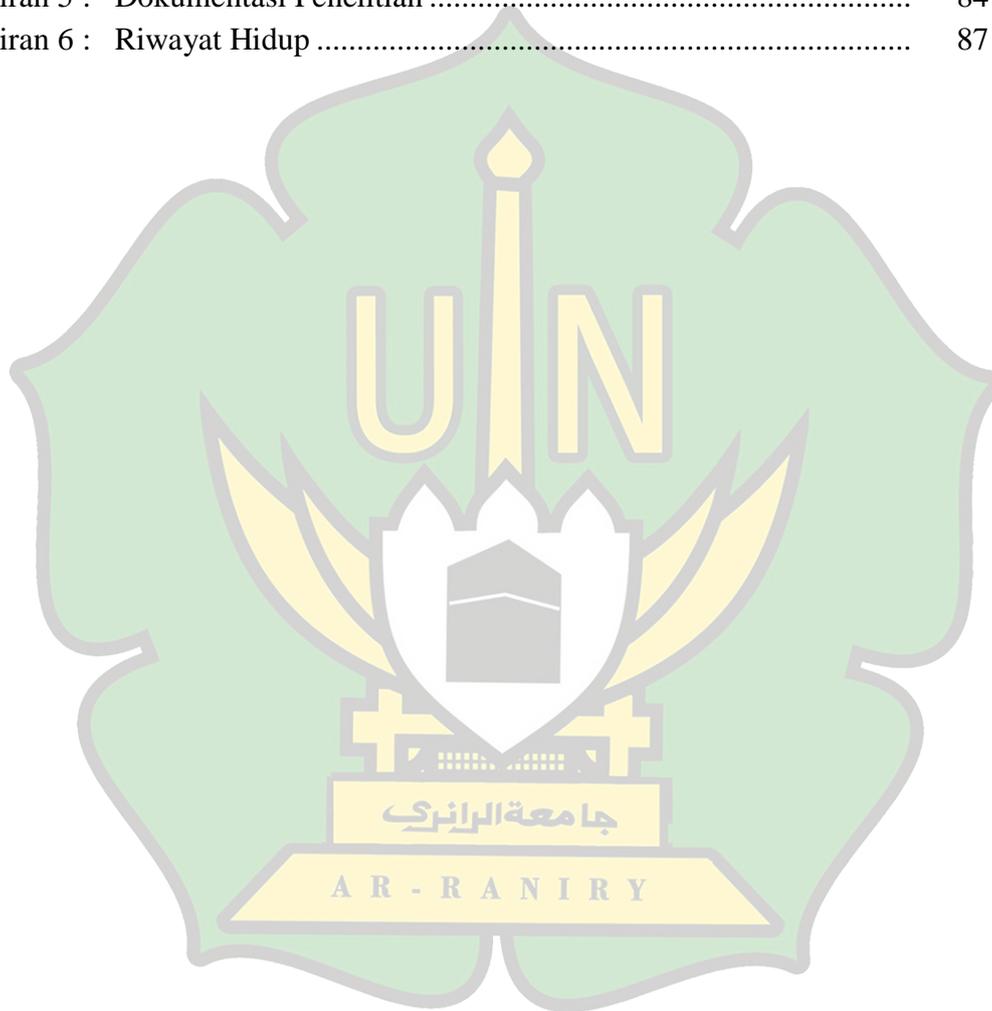
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Sosial Komplek Perumahan Desa Saney.....	31
Gambar 3.2	Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Saney	38
Gambar 4.1	Brosur Beasiswa Anak Nelayan YPMAN	57
Gambar 4.2	Brosur Beasiswa Anak Nelayan YPMAN	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	79
Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry.....	81
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian.....	82
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Desa Saney.....	83
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian	84
Lampiran 6 : Riwayat Hidup	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan atau disingkat dengan sebutan YPMAN yang didirikan oleh Lembaga Hukum Adat Laot Panglima Laot Aceh berdasarkan Akta Notaris No. 62 tanggal 28 November 2001. Yayasan ini terbentuk melalui pencapaian kesepakatan dalam pertemuan Panglima Laot di Aceh pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2001 di Banda Aceh. Ide dasar pendiriannya adalah untuk sebagai wadah dalam mewujudkan kepedulian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak nelayan di Provinsi Aceh melalui tiga bidang kegiatan utama yaitu sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yang paling menonjol saat ini adalah program pemberian beasiswa kepada pelajar, mahasiswa dan santri berprestasi dan kurang mampu dari kalangan anak nelayan. Untuk mewujudkan kegiatan utamanya tersebut Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) pertama kali mendapat dukungan dana dalam bentuk dana hibah dari Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp11,9 miliar. Dana ini bersumber dari hasil penyitaan dan penjualan kapal Thailand yang memasuki wilayah perairan Aceh secara ilegal.

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2007 Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) kembali menerima dana hibah kedua sebesar Rp 44,7 milyar dari Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana melalui Gubernur/Ketua Satkorlak PB Provinsi Aceh, yang penyerahan dananya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara pengganti jabatan. Gubernur Provinsi Aceh dan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) tanggal 2 Februari 2007. Sama halnya dengan dana hibah yang pertama, dana hibah yang kedua ini juga dikelola oleh Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) sebagai dana abadi. Penghasilan yang diperoleh dari hasil investasi Dana Abadi

akan dipergunakan untuk tiga hal dengan komposisi sebagai berikut : Dana Beasiswa 75%, Dana Operasional 15% dan Tambahan Dana Abadi 10%¹.

Sesuai dengan tujuan utama pendirian YPMAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak nelayan maka fokus kegiatan YPMAN adalah menyalurkan beasiswa kepada anak nelayan kurang mampu di Aceh terdiri dari :

Tabel 1.1

Program Beasiswa Reguler Mulai Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2017

No	STRATA PENDIDIKAN	PENERIMA	DANA DISALURAN
1.	SD/MIN/Sederajat	12,647	8530,320,000
2.	SMP/MTs/Pesantren/Sederajat	8,889	8,045,040,000
3.	SMU/SMA/SMK/ Pesantren/Sederajat	6,278	7,151,880,000
4.	Perguruan Tinggi (Akademi, Universitas dan Pesantren	3,086	5,269,800,000
	Jumlah	30,900	28,997,040,000

Sumber: Brosur YPMAN

Tabel 1.2

Program Beasiswa Khusus Mulai Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2017

STRATA PENDIDIKAN	TAHUN AJARAN			JUMLAH PENERIMA REALISASI	DANA TERSALURKAN
	2008 s/d 2015	2015s/d 2016	2016 s/d 2017		
SUPM Ladong	393	94	103	590	2.321,085,000
STP. Negri Jakarta	20	8	8	36	738,382,000
Skripsi dan Thesis	21	4	4	29	40,450,000
Hafiz/Hafizah	3	4	4	11	71,590,000
Pelatihan	97	.	.	97	415,395,000
Jumlah Realisasi	534	110	119	763	3,586,902,500

Sumber: brosur YPMAN

¹ <https://keuanganism.com/belajar-tentang-dana-abadi-dari-panglima-laot-aceh/>. Diakses pada 20 November 2020.

Berdasarkan data ini dapat kita lihat bahwa dana yang sudah dialokasikan untuk beasiswa anak nelayan sangat besar dan sangat disayangkan apabila dana yang sudah dialokasikan ini tidak dikelola dengan baik dan tidak tepat sasaran dalam pengalokasiannya, pengelolaan yang baik adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip transparansi di dalamnya.

Era globalisasi saat ini menuntut segala hal dalam pengelolaan tatanan sistem pemerintah lebih transparan karena prinsip Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana Pasal 28d menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh dan mengakses informasi, badan publik menyediakan serta melayani permintaan informasi secara cepat dan tepat waktu sebagaimana dalam pasal 28 f Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Tidak terkecuali dalam pengalokasian beasiswa anak nelayan. prinsip tata kelola yang transparan, dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dan penyalahgunaan anggaran, keterbukaan informasi merupakan suatu keharusan karena sumbatnya informasi akan menghasilkan asumsi-asumsi negatif dari masyarakat terhadap pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong, kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan observasi awal dari pengamatan peneliti saat terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai salah seorang warga Desa Saney Kecamatan Lhoong terdapat beberapa temuan di lapangan yang menarik untuk dibahas. Dimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengalokasian beasiswa ini masih kurang yang pertama masyarakat tidak mengetahui secara jelas dari mana sumber beasiswa ini, yang mereka tau ini adalah beasiswa yang diberikan khusus untuk anak-anak yang orangtuanya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana sistem penyaluran dana beasiswa, serta apa-

apa saja yang dapat membatalkan penyaluran beasiswa ini .Karena tidak ada pengumuman atau surat edaran khusus, baik itu dari kepala Desa maupun panglima laot setempat.

Dari uraian di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana sistematika pengalokasian beasiswa anak nelayan di Kabupaten Aceh Besar dengan mengangkat judul penelitian “Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Pengelolaan beasiswa anak nelayan di kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.
2. Melihat bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan beasiswa anak nelayan di kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar?
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar?

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di kecamatan Lhoong Aceh Besar.

2. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang peran Transparansi dalam dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Penjelasan Istilah

1. Pengelolaan Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) yang merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan erat dengan proses mengurus dan menangani sesuatu dalam mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai².

² Nugroho J. S, 2003,*Perilaku Konsumen* , Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta

2. Beasiswa anak nelayan adalah beasiswa yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya berprofesi sebagai nelayan dengan tujuan untuk keberlangsungan pendidikan.
3. Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) adalah yayasan yang dibentuk pada tahun 2002 oleh panglima laot untuk mengelola dana abadi yang awalnya bersumber dari hasil lelang kapal Thailand yang masuk ke daerah perairan Aceh.
4. Sekretaris adalah sebuah profesi administratif yang merujuk kepada sebuah pekerja kantor yang tugasnya ialah melaksanakan pekerjaan rutin, berupa tugas administratif dari atasannya. Biasanya seorang sekretaris melakukan tugas-tugas seperti menyetik, penggunaan komputer, dan pengaturan agenda.
5. Panglima Laot adalah adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa di Provinsi Aceh. Secara umum Panglima Laot memiliki kewenangan berupa pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut³.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat⁴.

³ kebudayaan.kemdikbud.go.id. (*bpnb aceh panglima laot yang mengatur adat melaut*) di akses 11: 20 Wib Jumat 18 Desember 2010.

⁴ Permendagri Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*.

8. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berada dan menetap di suatu tempat/wilayah.
9. Transparansi adalah keterbukaan informasi, sehingga bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. penelitian kualitatif merupakan rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan⁵. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat langsung bagaimana Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapat dari lapangan dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana pengalokasian serta proses pendaftaran beasiswa anak nelayan.

1.7.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah dalam suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan.

⁵ Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Aneka Cipta. Hlm 4

Fokus penelitian disini adalah ingin melihat bagaimana pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, peneliti juga ingin melihat bagaimana penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) dengan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tertib 2. Taat Kepada Peraturan Perundang-Undangan 3. Efektif dan Efisien 4. Transparan 5. Bertanggung Jawab 6. Keadilan 	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Transparansi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi yang jelas. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Menyusun Mekanisme pengaduan 4. Meningkatkan arus informasi 	Krina L.P.L. 2003. <i>Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi</i> . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 17.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya harus jelas lokasinya, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena untuk menjawab keresahan masyarakat selama ini menyangkut permasalahan Transparansi dalam pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Di Kecamatan Lhoong. Selain itu peneliti telah

menelusuri bahwa belum ada satupun penelitian terdahulu menyangkut pengelolaan beasiswa anak nelayan terutama di Kecamatan Lhoong.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Dikarenakan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Maka sumber data primer yang digunakan adalah teknik wawancara dalam pengumpulan data.

2). Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, berita dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder peneliti.

1.7.5 Informan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pemilihan informan harus dilakukan dengan teliti agar informasi yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode (*purposive sampling*) dalam memilih informan. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa “*Purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representative”⁷. Tujuan terpilihan sampel yang tepat adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan

⁶ Uber, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.291.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012. Hal 85

memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu yang ada sehingga memenuhi syarat *good informants* yaitu menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggung jawab dan memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya. Karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama yang harus mampu memainkan peran sebagai instrumen kreatif karena memiliki banyak peran baik sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan terakhir sebagai pelapor penelitian. Disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 9 (sebelas orang) orang yaitu:

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala/Sekretaris YPMAN	1 orang
2.	Panglima Laot	2 orang
3.	Kepala Desa	1 orang
4.	Nelayan penerima beasiswa	3 orang
5.	Nelayan tidak menerima beasiswa	2 orang
	Total	9 orang

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat

yang akan diteliti.⁸ Objek penelitian peneliti adalah transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala/sekretaris Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) untuk mendapatkan data/ informasi terkait pengelolaan beasiswa, selain itu peneliti juga mewawancarai Kepala Desa, Panglima Laot serta Masyarakat setempat yang menerima beasiswa dari Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN).

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi, mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan baik berupa buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika

⁸⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian : "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

⁹ Haris Herdiansyah, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai kepada tahap yang peneliti rasa sudah diperoleh data yang kredibel.

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan

2. Penyajian Data (*Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

¹⁰ Miles dan Huberman, Analisis Data kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.1992). Hal 16.

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi M. Hidayat Dwi Setyawan yang berjudul “Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru Smp N 3 Mertoyudan Magelang) 2015. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sangat besar pengaruh prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktivitas sekolah. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sekolah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran pendidikan dalam mengelola keuangan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik.¹¹

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Bentuk transparansi yaitu: pertama, penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. Kemudahan akses informasi. Kedua, Menyusun suatu mekanisme pengaduan. Ketiga, Meningkatkan arus informasi¹².

Nurul Hutami Ningsih, Nadia Yulianti Siwi. jurnal ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS) Pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang”¹³. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi komite sekolah terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

¹¹ M. Hidayat Dwi Setyawan, “Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru Smp N 3 Mertoyudan Magelang)”. 2015, Akses: [Http://unnes.ac.id](http://unnes.ac.id). pada 23 april 2020 pukul 21:34 WIB.

¹² Ibid hal 11

¹³ Nurul Hutami Ningsih, Nadia Yulianti Siwi, ”Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Rapbs)

anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa transparansi berkaitan dengan informasi organisasi yang mudah diakses oleh pihak- pihak berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar baik informasi keuangan, program maupun kinerja. Di sekolah transparansi harus dibuktikan dengan memberikan informasi pada setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu¹⁴.

Keterbukaan informasi yang disampaikan secara akurat dan tepat waktu akan menimbulkan efek timbal balik antara pihak internal maupun eksternal sekolah, serta mampu meningkatkan pengawasan terhadap mutu pendidikan¹⁵. Ketepatan pendayagunaan anggaran pendidikan tidak hanya akuntabilitas dan transparansi tetapi juga ditentukan oleh efisiensi. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan program sekolah. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan yakni prinsip akuntabilitas, transparansi guna mewujudkan tata kelola sekolah yang baik maka partisipasi komite sekolah memegang peranan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Dewi Ariani. jurnal ini berjudul “Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Di Indonesia” dalam jurnal ini dapat diambil kesimpulan berdasarkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi. Transparansi dalam pengelolaan keuangan tentu menuntut keterbukaan dalam mengelola setiap kegiatan yang dilaksanakan. Keterbukaan dalam sumber pemasukan beserta jumlah

Pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang”.E-jurnal Akuntanika, vol.5, no.2, 2019. Akses :[poltek anika.ac.id](http://poltek.anika.ac.id). pada 23 april 2020 jam 21: 20 WIB)

¹⁴ Solihat, Sugiharto “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orangtua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta*”.2009, Jurnal Ekonomi Bisnis No.2.

¹⁵ Windarti, “*Pengaruh Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada SMA Dan SMK Negeri Di Kota Madiun*”. 2015, Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April, hal.23-36, diakses 23 april 2020 pada 21:34 WIB.

rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua mahasiswa dan seluruh civitas academica melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan kampus atau universitas bukan semata tuntutan dari mahasiswa semata, namun sudah menjadi kewajiban kampus secara perundang-undangan. Melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang KIP). Pemerintah bersama DPR memudahkan masyarakat memiliki ruang terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Non-Pemerintah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Kenyataan hari ini dapat mudah dilihat koordinasi antara mahasiswa dengan pihak kampus hanya berupa hal akademik, administrasi akademik, dan kegiatan-kegiatan (itu pun harus lewat verifikasi dari Rektor)¹⁶.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti judul penelitian penulis karena lokus dan fokusnya berbeda, penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus penelitian peneliti pada transparansi dalam pengalokasian beasiswa anak nelayan di Aceh Besar.

¹⁶ Dewi Ariani, “Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Di Indonesia”. E-jurnal. Akses: uns.ac.id. pada 23 april 2020 jam 21:43 WIB.

2.2 Teori Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan dapat diartikan sebagai kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik dan memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan juga disebut sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu agar terasa lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*tomanage*) dan merujuk pada suatu proses dalam mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu¹⁷. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan merupakan ilmu yang menghubungkan antara ilmu management dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang akan dicapai.

Selanjutnya Atmosudirjo yang mendefinisikan pengelolaan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang sesuai menurut perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu¹⁸. Dari pengertian ini Atmosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya guna mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

2.2.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan

Secara etimologi menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) Pengelolaan artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima kemudian disalurkan atau dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan juga merupakan suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan sehingga sumber daya yang dikeluarkan bisa dipergunakan seefektif dan seefisien

¹⁷ J. Setiadi, Nugroho, SE., MM., 2003, "Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran". Jakarta: Kencana.

¹⁸ Atmosudirjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta. Hal 160

mungkin. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan suatu potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kajian pengelolaan keuangan. Pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan tidak heran banyak anak yang putus sekolah karena orang tuanya tak sanggup membiayai pendidikannya karena uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup tanpa uang.

Uang diibaratkan seperti darah dalam tubuh manusia, orang yang hidup tetapi kekurangan darah biasanya walaupun hidup tetapi tidak akan sehat seperti orang-orang yang cukup parah pada umumnya begitu juga sebaliknya orang yang kelebihan darah juga tidak bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya karena ada beberapa organ tubuhnya mengalami gangguan. Maka oleh karena itu uang harus dikelola dengan sebaik mungkin agar organisasi atau perusahaannya berjalan dengan baik.

Pengelolaan keuangan mencakup segala kegiatan administratif yang dimulai dari perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan hingga sampai kepada tahapan pertanggungjawaban (pelaporan keuangan) yang diaudit dengan jelas dan transparan agar uang yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diharapkan. E. Mulyasa menjelaskan bahwa tugas dari pengelolaan keuangan dapat dibagi menjadi beberapa fase yaitu :¹⁹

1. *Financial Planning*

Financial planning adalah kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang dapat merugikan.

¹⁹ Mulyasa, E, 2002, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

2. *Implementation*

Merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan.

3. *Evaluation*

Merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian yang telah diimplementasikan serta untuk melihat apakah sudah tepat sasaran dalam penerapannya.

Pembagian fase dalam pengelolaan keuangan seperti yang diuraikan di atas merupakan suatu solusi yang bagus dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, fase yang pertama dilakukan guna mengakomodir sumber daya dalam perencanaan kegiatan sebelum diimplementasikan, dalam fase pengimplementasian yaitu menerapkan atau merealisasikan seluruh kegiatan yang telah di rencana, kemudian masuk ke fase evaluasi adalah tahapan yang sangat penting untuk melihat sejauh mana penerapannya berjalan dan apa kendala yang dihadapi dalam penerapannya sehingga kita bisa mencari solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahannya.

2.2.3 Prinsip Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan, penerapan prinsip transparansi tidak hanya dalam bentuk keterbukaan informasi semata akan tetapi termasuk didalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan dan masyarakat. Apabila organisasi/perusahaan tidak transparan, hal ini menandakan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana Transparansi dalam pengelolaan beasiswa Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Selain pentingnya penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga ada beberapa prinsip lain yang harus diterapkan, dapat kita ambil pedoman dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara:

1. Tertib

Secara tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan

1. Taat Kepada Peraturan Perundang-Undangan

Secara taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Efektif

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

3. Efisien

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

4. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

5. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan tidak hanya prinsip transparansi saja yang menjadi prinsip utama dalam melihat kualitas pengelolaan keuangan akan tetapi terdapat beberapa indikator lain yang wajib ada dalam setiap pengelolaan keuangan.

2.3 Teori Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Hamid Muhammad, Transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat serta memadai²⁰.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang pada dasarnya memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mengakses informasi, dengan adanya Transparansi diharapkan dapat menjamin kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan serta proses pembuatan kebijakan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Transparansi Pengelolaan keuangan Daerah menerangkan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

Selain itu Transparansi juga memiliki arti keterbukaan dalam sebuah organisasi dalam penyajian informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam proses pemerintahan dan lembaga-

²⁰ Hamid Muhammad , Jurnal:” *Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*”. 2003, Hal. 31. Akses <https://journal.umy.ac.ad>. pada 30 Mei 2020.

lembaga terkait. Informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau sehingga dapat menjadi salah satu sarana dalam mengurangi kecurangan berupa tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Andrianto mengemukakan beberapa manfaat dari penerapan transparansi dalam pengelola anggaran sebagai berikut:²¹

1. Mencegah korupsi, dengan adanya penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam mencegah korupsi, karena dengan adanya Transparansi dalam dalam pengelolaan keuangan masyarakat dapat memantau kemana saja anggaran itu disalurkan.
2. Lebih mudah dalam mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan dalam sebuah kebijakan, dengan adanya transparansi kita bisa lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah dalam penerapan kebijakan publik karena masyarakat bisa ikut berpartisipasi menuangkan ide-ide dalam pembuatan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah, akuntabilitas dan Transparansi merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan karena Transparansi merupakan wujud dari akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa dengan mudah dalam menilai kinerja pemerintah dalam melakukan pelayan publik.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, tentunya dengan adanya Transparansi dalam pengelolaan keuangan masyarakat akan lebih percaya karena masyarakat bisa menilai dan melihat langsung bagaimana pengelolaan keuangan selama ini sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan lebih kepada pemerintah.

²¹ Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Anggota IKAPI Jatim: Malang.

5. Serta menguatkan kohesi, dikarenakan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk melalui penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan suatu hal utama dan yang terpenting dan tidak bisa diabaikan begitu saja, tentunya dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya dalam setiap pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang sejalan dengan tuntutan globalisasi

2.3.2 Prinsip Transparansi

Menurut Logos transparansi memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.²²

Logos juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip transparansi informasi meliputi:

1. Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun masyarakat
2. Mudah dipahami dan jelas.
3. Benar atau tidak menyesatkan.

Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan nyata

22 Logos, Jurnal: "Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)". 2005, Hal. 24. Akses: <https://journal.umy.ac.ad>. Pada 27 juni 2020 jam 21: 15 wib.

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).²³

2.3.3 Indikator Transparansi

Dalam mengukur sebuah penelitian tentu harus ada sebuah indikator yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai Indikator kinerja publik dalam penerapan prinsip transparansi. Dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bukti negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan.²⁴

Sedangkan menurut Krina indikator-indikator transparansi adalah sebagai berikut ini:

1. Penyediaan informasi yang jelas. kejelasan dalam penyediaan informasi merupakan keharusan yang harus dipenuhi dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan.
2. Kemudahan akses informasi. Informasi yang disediakan selain harus jelas juga harus mudah diakses oleh masyarakat.
3. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

²³ Sedarmayanti.2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju.

²⁴ https://www.kpk.go.id/images/pdf/pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf diakses pada 19 November 2020 pukul 10:00wib

Melalui beberapa indikator di atas dapat kita lihat bahwa Transparansi merupakan alat yang sangat penting sebagai perantara untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di daerah mereka sendiri.

Selain itu Krina juga menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi, contohnya seperti annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan, yang berupa acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan contohnya melalui berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of response*, limit waktu respon, *opinion polls* dan *survey* mengenai isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk dijadikan sebagai draft kebijakan dan peraturan, *service users surveys*.
4. Pertemuan masyarakat. pertemuan dengan masyarakat merupakan suatu hal yang penting guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penerapan sebuah kebijakan.
5. Mimbar rakyat. Selain pertemuan dengan masyarakat, mimbar rakyat merupakan suatu hal yang penting juga sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat²⁵.

Melalui penjelasan Krina di atas dapat kita pahami bahwa seharusnya pemerintah daerah harus mampu memuaskan rasa keingintahuan masyarakat dengan mentransparankan laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh badan pemerintah sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol dalam proses pengelolaan sebuah kebijakan.

²⁵ Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 17.

2.4 Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan atau disingkat dengan sebutan YPMAN yang didirikan oleh Lembaga Hukum Adat Laot Panglima Laot Aceh berdasarkan Akta Notaris No. 62 tanggal 28 November 2001. Yayasan ini terbentuk melalui pencapaian kesepakatan dalam pertemuan Panglima Laot di Aceh pada tanggal 19 sampai 21 Maret 2001 di Banda Aceh. Ide dasar dalam mendirikan yayasan ini dengan tujuan untuk mewujudkan kepedulian dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak nelayan di Provinsi Aceh melalui tiga bidang kegiatan utama yaitu sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yang paling menonjol saat ini adalah program pemberian beasiswa kepada siswa, mahasiswa dan santri berprestasi dan kurang mampu dari kalangan anak nelayan. Dengan adanya yayasan ini harapan utamanya adalah untuk meningkatkan pendidikan dengan mengurangi anak putus sekolah, karena dengan peningkatan kualitas pendidikan diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia dan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan pun dapat menurun.

2.4.1 Sumber Dana Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Untuk mewujudkan kegiatan utamanya tersebut Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) pertama kali mendapat dukungan dana dalam bentuk dana hibah dari Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp11,9 miliar. Dana ini bersumber dari hasil penyitaan dan penjualan kapal Thailand yang memasuki wilayah perairan Aceh secara ilegal.

Kemudian pada tanggal 13 Juni 2007 Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) kembali menerima dana hibah kedua sebesar Rp 44,7 milyar dari Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BNPB) melalui Gubernur/Ketua, yang penyerahan dananya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara pengganti jabatan.

Gubernur Provinsi Aceh dan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) tanggal 2 Februari 2007. Sama halnya dengan dana hibah yang pertama, dana hibah yang kedua ini juga dikelola oleh Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) sebagai dana abadi. Penghasilan yang diperoleh dari hasil investasi Dana Abadi akan dipergunakan untuk tiga hal dengan komposisi sebagai berikut : Dana Beasiswa 75%, Dana Operasional 15% dan Tambahan Dana Abadi 10%.²⁶

Dalam pengalokasian beasiswa anak nelayan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) telah menyalurkan beasiswa reguler untuk 33.653 anak nelayan Provinsi Aceh dari Tahun 2002 hingga saat ini.

2.5 Beasiswa Anak Nelayan

Beasiswa dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada pelajar dalam bentuk dana atau uang yang bisa digunakan untuk membantu proses pendidikan. Sesuai dengan terminology dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beasiswa merupakan tunjangan yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Murniasih menyatakan bahwa beasiswa merupakan sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, penghargaan ini berupa bantuan keuangan²⁷.

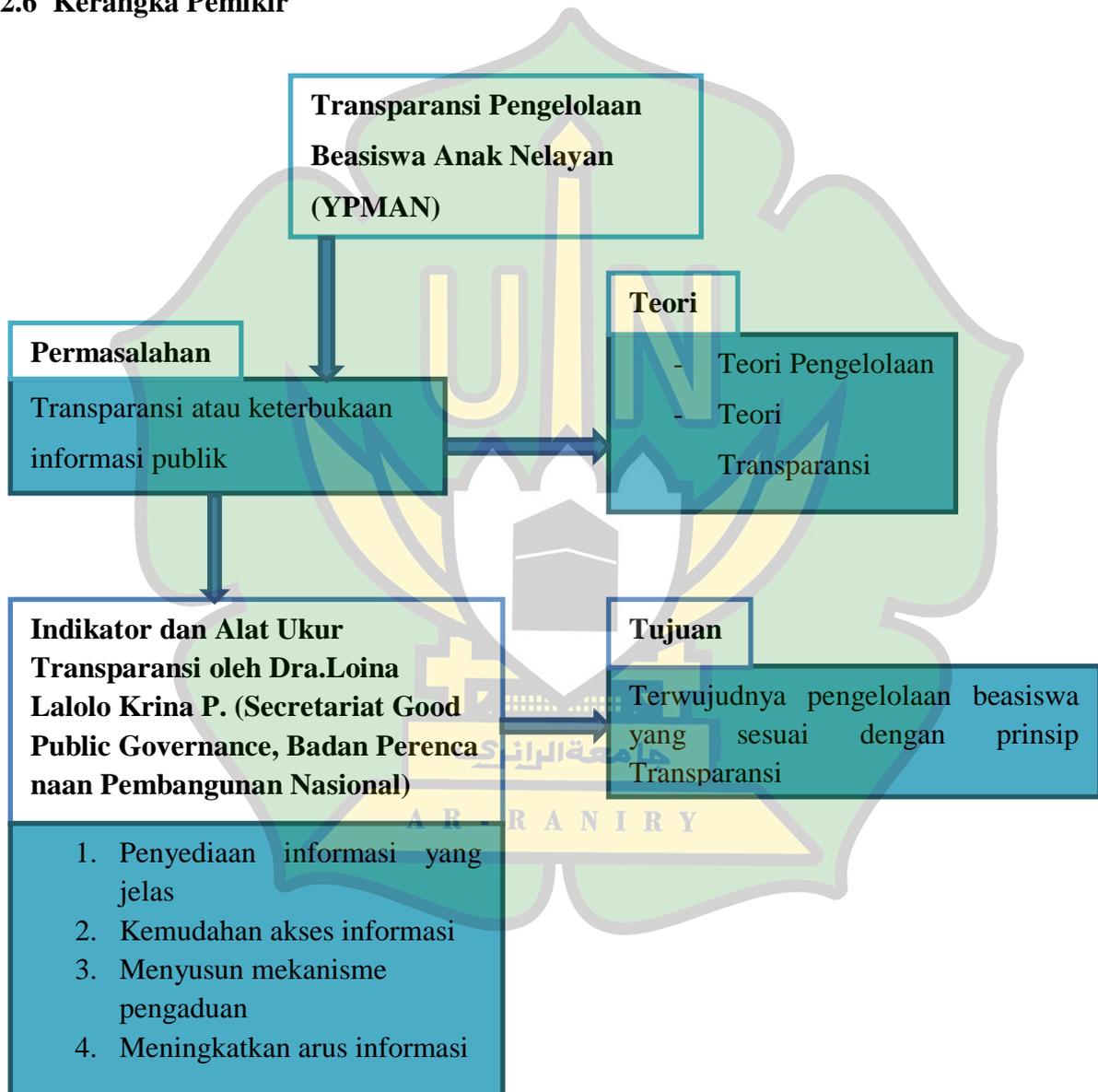
Beasiswa anak nelayan merupakan beasiswa yang disalurkan oleh Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) khusus untuk anak nelayan. Beasiswa ini mulai disalurkan sejak tahun 2002 hingga saat ini. asal mula terbentuknya yayasan ini adalah melalui kesepakatan panglima laot seluruh Aceh dengan tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan para nelayan yang ada di aceh melalui pemberian dana berupa beasiswa

²⁶ <https://keuanganism.com/belajar-tentang-dana-abadi-dari-panglima-laot-aceh/>. Diakses pada 20 November 2020, jam 22:47 wib.

²⁷ Murniasih, Erny. 2009. *Buku Pintar Beasiswa*. Jakarta: Gagas Media

untuk anak nelayan seluruh Aceh. Dana beasiswa ini pada awalnya bersumber dari hasil lelang kapal Thailand yang ditangkap karena memasuki kawasan perairan Aceh tanpa izin, dari hasil lelang kapal ini terkumpul dana sebesar 11,9 miliar maka terbentuklah Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) sebagai wadah pengelolaan beasiswa anak nelayan

2.6 Kerangka Pemikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Desa Saney

Desa Saney berdiri sejak zaman Belanda dan merupakan salah satu Gampong di pesisir pantai di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Asal mula nama Desa Saney berasal dari kata Sansekerta “ SANEE ” yang artinya Tempat Persinggahan, tetapi menurut cerita masyarakat saney /orang tua dulu adalah nama penyakit yang sering diderita warga, khusus bagian tulang karena tempat itu ada jin, sehingga dari warga menderita penyakit itu dan sampai sekarang kepercayaan tersebut masih melekat dalam masyarakat ,dan tiap-tiap tahun meminta korban. Apakah hal tersebut benar adanya atau cerita dongeng saja, dan ada juga cerita hal Gaib yaitu pandangan mata kita nampaknya dan hilang sekali- kali di mata kita lihat itu cerita orang zaman dulu.

Desa Saney sebelumnya sering disebut Ujong Tanjung“ Lhok Tulot”. Karna Desa kami dulu paling ujung dekat dengan pantai laut , Desa Saney sedikit lebih maju karena ditunjang oleh adanya tempat memancing ikan dan persinggahan Perahu atau Jaloe (Sampan) , dan banyak dikunjungi orang luar yaitu Lueng Birang tempat mancing ikan, dan juga ada cerita nenek moyang kami ada dua binatang ular besar dari darat disebut Seudong bertengkar dengan ular laut bernama Birang menurut kisah cerita yang menang dalam pertengkar tersebut oleh Birang Laut, dan bukti sekarang ada bekas batu terbelah yaitu dinamakan Lueng Birang. Dan sampai sekarang di pesisir batu tersebut di musim barat kita harus hati-hati karena ombak paling besar dan di pantai tersebut tiap tahun kami mengadakan kenduri semampu ada dari masyarakat. Asal mula kata Saney berawal dari cerita nenek moyang dulu ada kisah yaitu ada kayu besar dan hitam yang mengalir di dalam sungai, kadang-kadang

pandangan mata nampak dan kadang hilang, tetapi sampai sekarang belum ada penelitian tentang hal tersebut ada jin atau makhluk halus, di wilayah pesisir pantai tersebut. Selanjutnya Sistem Pemerintahan Desa Saney berasaskan pada pola adat istiadat dan kebudayaan dan peraturan yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Keuchik dan diwakili oleh seorang wakil Geuchik karna pada saat itu dalam susunan pemerintahan Desa belum ada istilah Dusun.

Oleh karena itu Wakil Geuchik sangat berperan penting dan Fungsi yang sama hal penting Seperti sekarang Kepala Dusun saat ini, Imum Mukim memiliki peran yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah Desa dan dalam memutuskan sebuah putusan adat gampong dalam wilayah mukim. Tuha Peut menjadi bagian Lembaga Penasehat Desa, Tuha Peut Sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Desa, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik, Imeum Meunasah berperan dalam kegiatan-kegiatan Keagamaan. Pada zaman dulu roda pemerintahan dilaksanakan di rumah Keuchik atau Balee sebagai kantor karena dulu belum ada kantor Geuchik seperti sekarang, dan dapat dibuktikan dengan adanya sejarah oleh orang tua terdahulu. Tempat tinggal penduduk yang sangat ramai sebagai Gampong yang dinamakan Desa Saney.

Sebagai saksi sejarah Desa Saney disini masih dapat dilihat :

- a. Tempat Lueng Birang
- b. Krueng Broek
- c. Desa Saney tempat kami tinggal, kenangan Musibah Gempa dan Tsunami
- d. Tempat persinggahan Boat Laut

Dari hasil peninggalan sejarah tersebut maka terbentuklah satu Desa yang diberi nama “SANEY” dan berdiri di kemukiman Lhoong kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh.²⁸

3.1.2 Letak Geografis

Desa Saney Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar secara topografi Desa Saney termasuk dalam kategori Daerah Pesisir Pantai. Adapun batas-batas wilayah Desa Saney Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :

- a. Sebelah Utara : Berbatas dengan Lautan dan Desa Lamgeuriheu
- b. Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Utamong
- c. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Lautan dan Desa Gapuy
- d. Sebelah Barat : Samudra Indonesia



Gambar 3.1: Peta Sosial Komplek Perumahan Desa Saney

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

3.1.3 Kondisi Demografis dan Kependudukan Desa

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan laporan RPJMG tahun 2016-2021 untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Desa Saney dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kondisi Demografi Gampong Saney

NO	URAIAN	KET
1.	Luas Wilayah Gampong : ± 342Ha	
2.	Jumlah Dusun : 4 (empat) Dusun Seulanga 124 Jiwa/ 42 KK Dusun Rambutan 81 Jiwa/ 29 KK Dusun Durian 44 Jiwa/ 22 KK	
3.	Topografi : Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) datar : 60 Ha Ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) : 3.40 M	
4.	Hidrologi : Irigasi Berpengairan non teknis Sumber air konsumsi rumah tangga : Air Sungai melalui Pipa Air	
5.	Luas Lahan Pertanian : Sawah Irigasi: 52 Ha Sawah Tadah Hujan : 5 Ha Perkebunan : 191 Ha	
6.	Luas Lahan Pemukiman : 152 Ha	
7.	Orbitasi : Jarak dari pusat Kecamatan : ± 2 KM Jarak dari Ibu kota Kabupaten : 125 KM Jarak dari Ibukota Kabupaten Terdekat : 54 KM Panjang Jalan Gampong : 2000 M Panjang Jalan Kecamatan : 1287 M	
8.	Letak : 095° 25'4"19" BT 05° 24'7"74" LU/LS	
9.	Kawasan Rawan Bencana : Banjir : - Ha Tsunami : 342 Ha	

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

2. Pendidikan

Rata-rata penduduk Desa saney memiliki tingkat pendidikan setingkat SLTA dan tidak terdapat penduduk usia sekolah (pendidikan dasar 9 tahun) yang putus sekolah.

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Saney.

No	Tingkat pendidikan	Keterangan Jiwa
1.	Tidak tamat SD	0
2.	Tamat SD	36 Jiwa
3.	Tamat SLTP	80 Jiwa
4.	Tamat SLTA	175 Jiwa
5.	Tamat S1	10 Jiwa
6.	Tamat Diploma	5 Jiwa
	Total	306 Jiwa

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

3. Sumber Daya Alam

Potensi Lahan Pertanian, Desa Saney dengan luas Tanah 342 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 37 Ha (...%) dan tanah bukan sawah seluas 10 Ha (...%). Lahan sawah, Lahan Pertanian 5 Ha dan Lahan Rawa-rawa 66 Ha, dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½ teknis dan tadah hujan. Sedangkan Lahan bukan sawah dikelompokkan menjadi perkebunan/bangunan dan lain-lain sebagaimana disajikan dalam tabel 1.3 berikut :

Tabel 3.3
Sumber Daya Alam

NO	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS Ha
1.	SAWAH	
	a. Irigasi Teknis	15 Ha
	b. Irigasi ½Teknis	10 Ha
	c. Tadah Hujan	7Ha
2.	BUKAN SAWAH	
	a. Pekarangan /Bangunan	20 Ha
	b. Perkebunan	10 Ha
	c. Lain-lain (jalan, makam, sungai)	275 Ha

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

4. Sumber Daya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia Desa Saney cukup memiliki keberagaman, dilihat dari jenis atau sumber mata pencaharian masyarakatnya. Adapun sektor utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian dan perikanan/kelautan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam uraian tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Sumber Daya Manusia

Lapangan pekerjaan	Tahun		
	2014	2015	2016
Pertanian	47	47	47
Pertukangan & Bangunan	16	20	21
Perdagangan	6	6	6
PNS	2	3	3
TNI/POLRI	3	3	3
Karyawan/swasta	0	0	0
Pensiunan	0	0	0
Nelayan	46	49	49
Jasa/Lainnya	0	0	0

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa masyarakat di Desa Saney lebih dominan berprofesi sebagai nelayan, dimana profesi ini sudah ada sejak dari zaman dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang yang masih dilestarikan sampai saat ini. Melaut dengan cara tradisional masih tetap dipraktikkan oleh nelayan saat ini di desa Saney menangkap ikan menggunakan jala atau dipancing cara kerja nelayan tradisional bisa dibilang sangat fleksibel dimana dalam sehari para nelayan ini bisa menghabiskan waktu sekitar setengah hari melaut dan setengah hari nya lagi ke sawah atau ke ladang.

5. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial kemasyarakatan Desa Saney sangat kental dengan sikap solidaritas sesama, baik sesama masyarakat Desa sendiri maupun dengan masyarakat luar. Kehidupan bermasyarakat di Desa Saney tetap berpedoman terhadap norma norma adat istiadat yang berlaku sejak zaman dulu, disini dapat dilihat dari peran Tuha Peut yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam pemeliharaan adat dan adat istiadat.

Untuk menjaga dan melindungi kebiasaan, reusam, adat dan adat istiadat di Desa Saney terutama setelah tokoh-tokoh adat atau orang-orang tua yang mengerti tentang adat dan adat istiadat yang berlaku di Desa Saney menjadi korban pada bencana alam gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004, Pemerintah Desa Saney telah mengeluarkan regulasi Desa berupa peraturan Desa tentang perkawinan dan kegiatan sosial keagamaan serta acara sunatan anak laki-laki dan do'a serta kunjungi kerumah orang yang meninggal dunia khusus Masyarakat Desa Saney dan Keluarga Masyarakat Saney yang ada disekitarnya, maksud dan tujuannya adalah sebagai bahan pedoman agar kebiasaan adat istiadat dikembangkan oleh generasi-generasi berikutnya.

Tabel 3.5
Keadaan Sosial Desa Saney

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Kependudukan :		
	Jumlah Penduduk	249 Jiwa	
	Jumlah Kepala Keluarga	93 KK	
	Jumlah Penduduk Laki – laki :	143 Jiwa	
	0 s/d 2 tahun	3 Jiwa	
	3 s/d 5 tahun	8 Jiwa	
	6 s/d 15 tahun	39 Jiwa	
	16 s/d 21 tahun	10 Jiwa	
	22 s/d 60 tahun	75 Jiwa	
	Lebih Dari 60 tahun	8 Jiwa	
		106 Jiwa	
	Jumlah Penduduk Perempuan		
	0 s/d 2 tahun	9 Jiwa	
	3 s/d 5 tahun	9 Jiwa	
6 s/d 15 tahun	22 Jiwa		
16 s/d 21 tahun	4 Jiwa		
22 s/d 60 tahun	59 Jiwa		
Lebih Dari 60 tahun	3 Jiwa		
2.	Kesejahteraan Sosial :		Penghasilan
	KK Pra Sejahtera		0 – 750rb
	KK Sejahtera 1		750rb – 1.5 Jt
	KK Sejahtera 2		1,5 Jt – 3 Jt
	KK Sejahtera 3		3 Jt Keatas

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bahwa mayoritas penduduk Desa Saney berusia 22 tahun ke atas dengan jumlah keseluruhan penduduknya sebanyak 249 jiwa.

3.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa

Sistem Pemerintahan Gampong Saney berasaskan pada pola adat istiadat dan kebudayaan dan peraturan yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Keuchik dan diwakili oleh seorang wakil Keuchik karna pada saat itu dalam susunan pemerintahan Gampong belum ada istilah Dusun. Oleh karena itu Wakil

Geuchik sangat berperan penting dan Fungsi yang sama hal penting Seperti sekarang Kepala Dusun saat ini, Imum Mukim memiliki peran yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah Desa dan dalam memutuskan sebuah keputusan adat gampong dalam wilayah mukim. Tuha Peut menjadi bagian Lembaga Penasehat Desa, Tuha Peut Sangat berperan dan berwenang dalam memberi pertimbangan terhadap pengambilan keputusan-keputusan Desa, memantau kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Keuchik, Imeum Meunasah berperan dalam kegiatan-kegiatan Keagamaan.

Di Desa Saney pembangunan fisik seperti meunasah, kantor kepala Desa, jalan Desa semenjak dari tahun 1954 telah dimulai dibangun dari hasil swadaya masyarakat. Balai pengajian dibangun Tahun 1964 dan direhab di Tahun 1984, meunasah Desa dibangun Tahun 1989 dan kantor kepala Desa dibangun secara permanen dengan biaya swadaya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 1989, polindes dibangun Tahun 1991 dan tanggul pengaman tepi pantai laut (talud) Desa. Sepanjang 2 kilo meter dibangun Tahun 1984 dan jembatan penghubung Desa.

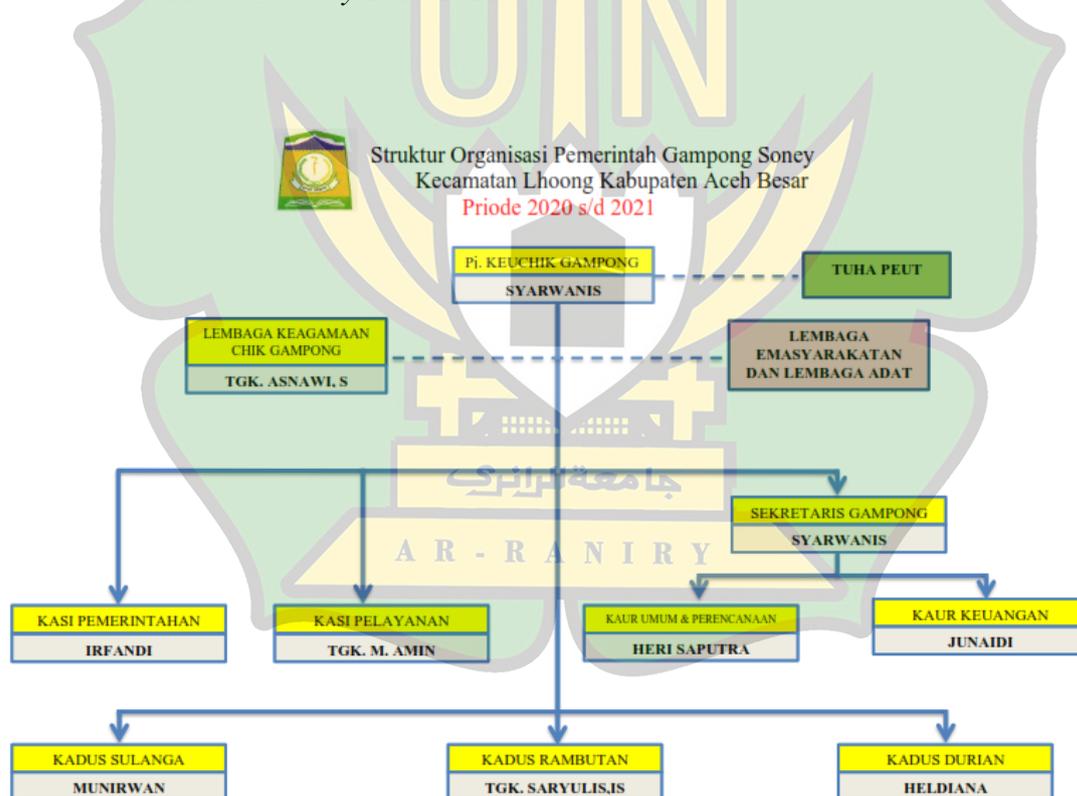
keberadaan kepemimpinan yang pernah menjabat dan memimpin sampai sekarang yaitu: Urutan Pemimpin Pemerintahan Desa Saney atau Keuchik menurut Informasi para peutua Desa Sejak Tahun 1910 s/d Sekarang.²⁹

²⁹ RPJMG Saney 2018-2021

Tabel 3.6
Sejarah Pemerintahan Desa Saney

No	Nama Keuchik	Periode Pemerintahan
1.	Geuchik Nyakmad	1930 s/d 1950
2.	Geuchik Ibrahim	1950 s/d 1968
3.	Geuchik Kamaruddin	1968 s/d 1969
4.	Geuchik Nurdin	1969 s/d 1987
5.	Keuchik Ali Imran. Is	1987 s/d 2004
6.	Keuchik Zahrin Nur	2004 s/d 2019
7.	Keuchik PJ Syarwanis	2020-2021

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Gampong Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Saney Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Sumber: RPJMG Saney 2018-2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

4.1.1 Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

4.1.1.1 Sejarah Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Inisiatif pendirian Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) berawal dari kesepakatan yang dicapai di dalam pertemuan Panglima laot se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 19-20 Maret 2001 di Banda Aceh para Panglima laot Aceh menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir sangat memprihatinkan dimana hampir 40% anak-anak putus sekolah berasal dari daerah pesisir. Berdasarkan dari keprihatinan tersebut Panglima laot se-Aceh menganggap perlu dibentuk sebuah lembaga yang fokus terhadap pengembangan sumber daya manusia khususnya anak-anak nelayan keinginan Ini mendapat dukungan dan asistensi yang penuh dari Menteri Kelautan dan Perikanan waktu itu bapak Sarwono Kusuma Atmaja dan Gubernur Aceh Ir. H. Abdullah Puteh dan Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar MSI. Para pendiri sepakat membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) Aceh. tujuan utama pendirian YPMAN.

adalah untuk mewujudkan suatu wadah bagi pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak nelayan di Provinsi Aceh melalui tiga bidang kegiatan utama yaitu bidang sosial bidang kemanusiaan dan bidang keagamaan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh panglima laot lhok di Desa Saney oleh pak Thamrin Usman yang telah menjabat sebagai panglima laot lhok dari semenjak terbentuknya YPMAN.

*“Beasiswa ini diberikan untuk mensejahterakan nelayan. ya walaupun tidak seberapa tapi ada lah membantu sedikit keringanan orang tua dalam menyekolahkan anaknya bisa bantu buat beli baju sekolah, sepatu, buku dan keperluan lainnya”.*³⁰

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa beasiswa anak nelayan ini merupakan beasiswa yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia anak nelayan sekaligus sebuah strategi dalam membantu mengurangi beban para nelayan dalam menyekolahkan anak-anaknya.

4.1.1.2 Legalitas Pendirian Yayasan Yayasan pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Yayasan pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Aceh merupakan salah satu badan otonomi dibawah lembaga hukum Adat Aceh yaitu Panglima Laut Aceh yang didirikan pada Tahun 2001 dengan Akta Notaris Nomor 62 tanggal 28 November 2001. Menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 akta ini kemudian diubah dengan akta pendirian Nomor 61 tanggal 29 Agustus 2009 yang seterusnya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU 3108.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008 dan telah diumumkan di dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 September 2009 Nomor 70. Untuk kelengkapan administrasi YPMAN telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.418.790.8-101.000

³⁰ Wawancara dengan bapak Thamrin Usman, panglima laot lhok Saney pada tanggal 9 Januari 2021

4.1.1.3 Susunan Kepengurusan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh panglima laot dikarenakan lahir nya YPMAN ini karena kesepakatan yang dibuat oleh panglima laot se-Aceh. Dalam pengelolaannya terdapat tiga susunan kepengurusan YPMAN periode 2017-2022:

Susunan Dewan Pembina:

Ketuan : Dr.Ir. H Mustafa Abubakar, M,Si.

Anggota : Ir. Sarwono Kusumaatmadja.

Prof. Dr.Ir. H. Ahmad Humam Hamid, MA.

Prof. H. Dahlan, SH. MH.

Dr. H. Nazamudin, MA.

H. Murhaban Makam.

Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH.,MCL.

Susunan Kepengurusan Harian Periode 2012-2017:

Ketua Umum : H.T. Bustamam.

Ketua : H. Musfiari Haridhi, SE. MBA.

Sekretaris Umum : Miftachhuddin Cut Adek, SE, M.Si.

Sekretaris : T. Faisal, SE.

Bendahara Umum: H. Achmad Abdul Jalil, SE.

Bendahara : T. Mahzuarsyah.

Susunan Pengawas periode 2012-2017:

Ketua : Ir. H. T. Said Mustafa, M.Si

Anggota: DR. H. Ridwan Ibrahim,SE, MM, CA.

H. Muhammad Djakfar Karim.

Berdasarkan struktur susunan kepengurusan di atas dapat kita lihat bahwa YPMAN ini dikelola oleh orang-orang hebat yang bergelar dan berpendidikan, dalam kepengurusannya YPMAN juga disertai dengan dewan pembina dan dewan pengawas yang memiliki peran penting dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan untuk mewujudkan pengelolaan yang baik serta transparan membutuhkan pengawasan dan pembinaan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN yang menjelaskan bahwa:

“Tugas dewan pembina itu menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan serta mengesahkan program kerja yang akan dibuat dan dewan pembina juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus dan anggota pengawas, sedangkan tugas dewan pengawas adalah mengawasi dan memberikan masukan kepada pengurus dalam menjalankan yayasan, pengawas ini juga melakukan pemeriksaan dokumen keuangan dalam setahun sekali dan setelah kami salur beasiswa di setiap tahunnya kami berikan laporannya kepada dewan pengawas yayasan .³¹”

Beliau juga mengatakan bahwa:

“Susunan kepengurusan ini dibentuk selama 6 tahun sekali melalui rapat umum yang diikuti oleh seluruh panglima laot yang diwakili oleh panglima laot kabupaten, dalam setiap kabupaten di Aceh ini ada satu orang panglima dimana panglima kabupaten ini dipilih oleh panglima laot lhok yang terdapat di setiap kecamatan di kabupaten tersebut. Berdasarkan hasil keputusan daripada rapat ini maka terbentuklah susunan kepengurusan YPMAN dalam pengelolaan beasiswa ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris YPMAN di atas dari disimpulkan bahwa dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan dibentuk dewan pengawas dan dewan pembina yang masing-masing dari mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

³¹ Wawancara dengan bapak Miftachhuiddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

4.1.1.4 Visi dan Misi Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi, begitu juga dengan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) yang menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut ini:

a. Visi

Masyarakat nelayan Aceh yang unggul Sejahtera Mandiri dan Madani tahun 2045

b. Misi

1. Menyalurkan beasiswa kepada anak nelayan miskin dan bantuan pendidikan khusus
2. Menyelenggarakan pendidikan penelitian pelatihan lokakarya dan seminar
3. Menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat nelayan yang mengalami musibah
4. mendukung peningkatan kualitas layanan sosial untuk masyarakat nelayan

Berdasarkan visi dan misi di atas kita dapat melihat bahwa YPMAN memiliki visi dan misi yang strategis dalam mensejahterakan para nelayan, berdasarkan misi untuk untuk mewujudkan nelayan Aceh yang mandiri sejahtera dan madani di masa depan, ini merupakan perencanaan jangka panjang yang sangat yang sangat bagus, serta didukung dengan misi-misi yang baik pula yaitu menyalurkan beasiswa kepada anak nelayan kurang mampu, menyelenggarakan pendidikan pelatihan, menyalurkan bantuan sosial bagi nelayan yang kena musibah dan ikut serta mendukung peningkatan kualitas layanan sosial untuk masyarakat nelayan.

4.1.1.5 Rencana Kerja Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) 2017-2020

Selain dari visi dan misi untuk mewujudkan pengelolaan beasiswa anak nelayan yang baik dan terarah, Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) juga membuat rencana kerja jangka menengah dari tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil rapat dewan

Pembina pengurus dan pengawas tanggal 26 Agustus 2017 telah menetapkan kebijakan umum sebagai dasar penyusunan program kerja jangka menengah 2017 sampai dengan 2022 yang terdiri dari:

1. Program beasiswa reguler dan beasiswa khusus yang secara bertahap diperbanyak untuk sekolah-sekolah kejuruan
2. Program pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan bidang Kelautan dan Perikanan
3. Program pengembangan usaha ekonomi nelayan
4. Program konservasi Kelautan dan pembinaan pemukiman nelayan

Pembiayaan program beasiswa reguler dan beasiswa khusus menggunakan penghasilan dari pengelolaan dana abadi YPMAN sementara untuk program pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan program pengembangan usaha ekonomi nelayan dan program konservasi dan pembinaan pemukiman nelayan akan diupayakan dari dana pihak ketiga yang sah baik dalam bentuk hibah maupun investasi murni.

4.1.1.6 Prosedur Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Terkait prosedur dalam pengelolaan beasiswa ini sepenuhnya ditentukan oleh panglima laot lhok atau biasanya disebut pawang laot yang ada di setiap mukim di kecamatan, begitu juga di Kecamatan Lhoong. Kecamatan Lhoong terdiri dari 4 Mukim yaitu Mukim Blang Mee, Mukim Cot Jeumpa, Mukim Glee Bruék dan Mukim Lhoong. Dengan 28 Desa³². Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang dekat dengan laut dan gunung sehingga menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam hal hasil buminya. Saat ini mata pencaharian masyarakat adalah nelayan.

Setiap tahun nya kecamatan Lhoong mendapatkan kuota 28 orang anak, dari 28 ini

³² Acehbesarkab.bps.go.id di akses pada 25 Januari 2021 pukul 22:20 WIB

dibagi kepada 3 panglima laot masing-masing lhok yang ada di Kecamatan Lhoong. Desa Saney mendapatkan kuota sebanyak 14 kuota yang terdiri dari SD 7 orang, SMP 4 orang dan SMA 2 orang 1 orang perguruan tinggi. Sesuai dengan hasil wawancara bersama pak Thamrin Usman selaku panglima laot lhok Desa Saney yang termasuk mukim Lhoong. Dalam pengalokasian beasiswa ini khususnya di Kecamatan Lhoong tidak ada penetapan Desa mana saja yang bisa mendapatkan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pak Mahdi Muhammad Jamal salah seorang panglima lhok di Kecamatan Lhoong sekaligus menjabat sebagai wakil panglima laot Kabupaten Aceh Besar:

“ Tidak ada di tetapkan gampong, lihat pekerjaan ayahnya kalo nelayan tetap kasih beasiswa walaupun dia tinggal di Lamjuhang atau lamsujen kan tidak ada laut. Tapi tetap kasih, itu tanggung jawab panglima lhok di mukim tersebut yang mendatanya untuk dapat beasiswa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan khusus baik itu dari pusat oleh YPMAN ataupun oleh panglima laot Kabupaten menyangkut desa mana saja yang bisa mendapatkan beasiswa anak nelayan.

Kemudian menyangkut penyaluran beasiswa setiap setahun sekali anak nelayan yang berhak mendapatkan beasiswa akan didata oleh panglima laot lhok, kemudian data tersebut akan diserahkan kepada kantor YPMAN pusat yang terletak di Jalan. Laksamana Malahayati No.Km.6,5, Baet, Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Indonesia. Sesuai dengan hasil wawancara dengan panglima lhok Mukim Glee Bruek Kecamatan Lhoong :

*“Di Kecamatan Lhoong ada 4 mukim yang di pimpin oleh 3 panglima laot lhok, Mukim Lhoong dan Mukim Blang mee dipimpin oleh pawang Thamrin Usman biasa dipanggil bang meren, dan Mukim Glee Bruek untuk saat ini saya yang pimpin. Sedangkan mukim Cot Jeumpa dipimpin oleh pawang jailani”.*³³

Selain itu beliau juga menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang panglima laot lhok adalah :

³³ Wawancara dengan bapak Mahdi Muhammad Jamal panglima lhok di Kecamatan Lhoog sekaligus menjabat sebagai wakil panglima laot Kabupaten Aceh Besar. Pada tanggal 9 Januari 2021.

“Tugas seorang panglima lhok itu menjaga hukom (hukum) dan adat laot seperti peusujuk boet/jalo (sampun) yang baru selesai dibuat, kenduri tolak bala (berdoa untuk menolak bala) di laut biasanya ada dipotong kambing, serta menjadi penengah apabila ada sengketa atau permasalahan di antara nelayan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab seorang panglima laot lhok itu adalah menjaga ketertiban dan kemakmuran masyarakat di pesisir pantai (nelayan) serta menjaga hukum dan adat laot (ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat nelayan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan panglima Laot Lhok di desa Saney Terkait pendataan anak nelayan untuk diberikan beasiswa, beliau menjelaskan bahwa:

*“Pihak YPMAN setiap tahunnya meminta data anak-anak nelayan di Desa Saney yang berhak mendapatkan beasiswa kepada setiap panglima lhok di Kecamatan Lhoong, biasanya setiap tahun itu sudah ditetapkan berapa kuota. untuk melakukan pendataannya kami akan kabari setiap orang tua yang kami lihat dia berhak untuk dapat beasiswa ini, setelah di kasih tau berkas apa-apa saja yang harus disiapkan kemudian diantar kesini, setelah semuanya terkumpul baru kemudian kami antar ke kantor YPMAN”.*³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk diberikan beasiswa anak nelayan terlebih dahulu dilakukan pendataan oleh panglima laot lhok setempat setiap setahun sekali yang kemudian data beserta dengan berkas-berkas persyaratan lainnya seperti buku tabungan, kartu keluarga, KTP orang tua/wali serta surat keterangan aktif sekolah. Kemudian oleh panglima laot lhok akan diserahkan kepada panglima laot Kabupaten dalam hal ini panglima laot lhok di Kecamatan Lhoong menyerahkan berkasnya kepada panglima laot Kabupaten Aceh Besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendataan calon beasiswa anak nelayan dilakukan dengan cara:

1. Setiap tahunnya pihak YPMAN meminta kepada panglima laot lhok di setiap kecamatan untuk mengirim data anak-anak nelayan yang berhak mendapatkan beasiswa dengan kuota yang telah ditentukan.

³⁴ Wawancara dengan bapak Thamrin Usman, panglima laot lhok Saney pada tanggal 9 Januari 2021

2. Kemudian panglima laot lhok mendatangi keluarga nelayan untuk meminta berkas-berkas persyaratan pendataan untuk mendapatkan beasiswa
3. Berkas yang sudah dilengkapi kemudian diserahkan kepada panglima laot lhok
4. Setelah datanya terkumpul semua kemudian baru diantar oleh panglima laot ke kantor YPMAN untuk di proses pencairan dana beasiswa selama setahun kedepan.

Beasiswa ini disalurkan langsung melalui bank, jadi setiap anak nelayan yang akan mendapatkan beasiswa ini harus membuat buku tabungan terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan dalam mengurus beasiswa anak nelayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari sekretaris YPMAN bahwasannya:

*“Kita mengirim langsung kepada siswa-siswa yang bersangkutan melalui bank dan kita mengirimnya setelah data-datanya dilengkapi maka data tersebut akan diberikan oleh panglima laot lhok kepada panglima Kabupaten/Kota sampai di kabupaten disusun atau di edit baru dikirim kalau sudah lengkap semua baru di kirim kesini, sampai di sini kita tabulasi tekan excel maka muncullah data dari kabupaten ini lhok ini sekian jumlah dana sekian nomor rekeningnya sekian. Awal bulan 12 sudah selesai kita kirim ke rekening masing-masing siswa, dan kami kirim selama 6 bulan sekali ”.*³⁵

Selain panglima laot lhok, kepala Desa selaku pemegang kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa juga memiliki peran penting dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Desa Saney. Dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Sebagai kepala Desa disini saya bertanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, kalau ada permasalahan akan kami selesaikan dengan cara musyawarah dan seluruh perangkat Desa juga tau apa saja permasalahan yang terjadi di Desa untuk diselesaikan bersama-sama ”.*³⁶

Sesuai dengan pernyataan di atas memang bahwasannya kepala Desa sangat berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa. Begitu juga yang dirasakan oleh bapak Sayarwanis selaku kepala Desa Saney. Dalam setiap pengelolaan apa saja pasti ada

³⁵ Wawancara dengan bapak Miftachhuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

³⁶ Wawancara dengan bapak Syarwanis selaku Kepala Desa Saney pada tanggal 9 Januari 2021

kendala baik itu kenda di internal maupun di eksternal. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari sekretaris YPMAN:

“Dalam pengelolaan apapun pasti ada kendala, begitu juga dengan pengelolaan beasiswa ini, kendalanya itu saat kita minta kirimkan data anak-anak yang mendapatkan beasiswa terkadang lama dikirim oleh panglima lhok sehingga proses input data di sini juga terhambat dalam pencairan dananya juga akan terhambat”.³⁷

Begitu juga di Desa tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengurus beasiswa ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat desa Saney sebagai penerima beasiswa anak nelayan, terkait kendala dalam pengurusan beasiswa anak nelayan beliau mengatakan bahwa:

“Kendala khusus tidak ada dek, cuman kadang-kadang panglima laot menginformasikan untuk dinaikan data beasiswa terkadang mendadak, ada syarat yg gak lengkap misalnya photo copy ktp ada tapi foto copy KK gak ada, tidak sempat kita siapkan. Harus ke photo copy dulu besoknya baru antar semua berkas yang sudah lengkap untuk di kasih ke rumah panglima laot”.³⁸

Selain itu beliau juga mengatakan bahwa:

“ Tidak terkendala apa-apa, karena berkas yang harus di kasih ke panglima laot sebagai persyaratan nya juga tidak susah, seperti photo copy Kartu Keluarga (KK), photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan aktif sekolah dan photo copy rapor di lembaran nilai terakhir”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam mengurus beasiswa anak nelayan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam jangka satu hari semua berkas persyaratan bisa disiapkan, sehingga tidak ada kendala khusus yang dihadapi dalam mengurus beasiswa ini. Terkait hal ini salah seorang masyarakat mengatakan bahwa:

“ Yang susah itu saat ke bank buat buru rekening, harus ke Banda Aceh kadang-kadang kita sibuk tidak sempat pergi ke Banda dan jauh dari Lhoong, habis uang lagi disitu yang ribetnya tapi kalau tentang persyaratan yang lain gampang kita urus seperti photo copy rapor, surat keterangan dari kepala sekolah, photocopy kartu

³⁷ Wawancara dengan bapak Miftachhuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

³⁸ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

³⁹ Wawancara dengan ibu Nurhayati pada tanggal 16 Januari 2021

*keluarga dan photo copy KTP itu mudah”.*⁴⁰

Mengenai kriteria anak nelayan yang bisa mendapatkan beasiswa ini, dijelaskan oleh Panglima laot lhok Desa Saney:

“Yang pasti harus anak nelayan karena ini merupakan beasiswa anak nelayan jadi yang diutamakan anak nelayan, hanya anak nelayan yang kurang mampu yang bisa mendapatkan beasiswa ini, selain itu anak yatim yang tinggal di desa dekat laut juga kami masukkan, serta anak petani yang kurang mampu yang tinggal di pesisir laut juga kami data walaupun ayah nya bukan nelayan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan panglima lhok di Desa Saney beliau menjelaskan bahwa beasiswa ini dikhususkan untuk anak nelayan yang kurang mampu, karena tidak semua anak nelayan itu kurang mampu ada beberapa anak nelayan yang justru hidupnya mewah karena ayah nya toke boet (toke kapal), selain itu anak yatim yang tinggal di pesisir pantai juga diberikan dan anak petani kurang mampu yang tinggal di pesisir laut juga diberikan. Menyangkut dengan kriteria anak nelayan yang bisa mendapatkan beasiswa ini sepenuhnya ada di tangan panglima laot karena panglima laot lah yang memegang kekuasaan penuh serta yang melihat layak tidaknya seorang anak untuk mendapatkan beasiswa ini. hal ini juga sejalan dengan penjelasan oleh sekretaris umum YPMAN yang sedang menjabat sekarang, bahwa:

*“Syarat pertama yang mendapatkan beasiswa itu anak nelayan, oo pak saya ada anak tapi dia petani tambak itu bukan syarat pertama tapi syarat kedua kalo tidak cukup anak tidak apa-apa boleh di masukkan saja, oo misalnya ada pertimbangan anak yatim dia kasih tidak apa-apa asal jangan orang tuanya pegawai negeri dan orang kaya walaupun dia anak nelayan tapi dia kaya jangan di utamakan lah yang diutamakan orang-orang yang membutuhkannya itu kan anjuran kita”*⁴¹

Beasiswa anak nelayan ini bisa saja sewaktu-waktu di alihkan ke orang lain dengan alasan tertentu atau diberikan secara bergiliran dalam setiap tahunnya karena mengingat dana yang terbatas dan anak nelayan yang berhak mendapatkan beasiswa ini jura ramai. Hal

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Khatijah pada 16 Januari 2021.

⁴¹ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

ini sesuai dengan penjelasan dari panglima lhok Desa Saney:

*“Beasiswa ini kami berikan secara bergiliran, karena kuotanya tidak cukup sedangkan anak yang berhak dikasih beasiswa banyak. Jadi kami putuskanlah untuk kasih secara bertahap, dan beasiswa ini tidak kami lagi kalau sudah dapat beasiswa dari sekolah seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Karena kasihan anak lain yang tidak dapat makanya semenjak adanya beasiswa di sekolah beasiswa anak nelayan ini tidak dapat lagi, dan dalam satu keluarga hanya satu orang saja yang dapat beasiswa ini bisa kakaknya atau adiknya karena tidak bisa diberikan untuk kedua-duanya”.*⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat yang dulunya pernah mendapatkan beasiswa anak nelayan:

*“ Saya ada dua anak, dulunya kakaknya yang dapat semenjak kakaknya sekolah SMA di pesantren sudah dialihkan sama adiknya yang masih kelas SD waktu itu, adiknya dapatkan beasiswa ini cuma setahun dan tahun berikutnya nggak dapat lagi karena sudah dapat beasiswa di sekolah jadi dialihkan ke orang lain kata panglima laot, sebenarnya saya sedih tapi mau dibuat bagaimana lagi sudah keputusan dari panglimanya begitu ”.*⁴³

Selain itu peneliti juga mewawancarai salah seorang ibu rumah tangga yang juga pernah mendapatkan Beasiswa Anak Nelayan:

*“Anak saya dulu mendapatkan beasiswa ini bisa dibilang sangat lama. Mulai dia Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Akhir (SMA). Setelah dia tamat Sekolah Menengah Akhir (SMA). nggak dapat lagi karena dia menganggur setahun baru kemudian lanjut kuliah lagi”.*⁴⁴

Ibu Juariah ini merupakan seorang janda suaminya meninggal terkena tsunami pada tahun 2004 silam. Dulu suaminya juga melaut seperti masyarakat pada umumnya yang tinggal di pesisir pantai, kini Ibu Juariah hanya tinggal dengan dua orang anak perempuannya. Anak sulung ibu juariah mendapatkan beasiswa anak nelayan, dapat kita rasakan begitu besar peran beasiswa ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Lhoong serta mensejahterakan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Walaupun tidak begitu besar beasiswa yang diberikan tapi terasa manfaatnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa persyaratan

⁴² Wawancara dengan bapak Tamrin Usman, panglima laot lhok Saney pada tanggal 9 Januari 2021

⁴³ Wawancara bapak Yusmadi pada tanggal 16 Januari 2021

⁴⁴ Wawancara dengan ibu Juariyah pada 16 Januari 2021

sebagai penerima beasiswa anak nelayan adalah sebagai berikut ini :

1. Anak nelayan yang kurang mampu, layak atau tidaknya seorang anak mendapatkan beasiswa ini dinilai oleh panglima laot lhok yang ada di setiap lhok di Kecamatan tersebut.
2. Selain anak nelayan, anak yatim dan anak petani kurang mampu yang tinggal di pinggir laut juga bisa mendapatkan beasiswa anak nelayan, hal ini berdasarkan keputusan dan kesepakatan panglima lhok yang ada di kecamatan tersebut.

Menyangkut pengalokasiannya, beasiswa anak nelayan ini di berikan sesuai dengan jenjang/tingkat sekolah yang ditempuh, berdasarkan wawancara dengan sekretaris YPMAN beliau mengatakan bahwa:

*“ Beasiswa yang diberikan tidak semuanya sama, tapi sesuai dengan tingkat/jenjang sekolah yang ditempuh. Kalau Sekolah Dasar (SD) setiap bulannya mendapatkan Rp.60.000 Sekolah Dasar (SD) mendapatkan lebih sedikit karena kebutuhannya masih sedikit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih banyak sedikit daripada SD yaitu Rp. 80.000, SMA lebih lagi karena kebutuhannya yaitu Rp.100.000. Sedangkan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi setiap bulannya mendapatkan Rp.150.000”.*⁴⁵

Untuk mengevaluasi apakah beasiswa ini diberikan kepada orang tepat dan untuk melihat output yang didapatkan maka YPMAN melakukan rapat evaluasi setiap tahun sekali, hal ini juga disampaikan oleh sekretaris YPMAN bahwa:

“Ada rapat tahunan biasanya dari bulan Juli sampai bulan November, Juli dan Agustus kita ada di rapat dan September Oktober November kita kasih 3 bulan ini untuk panglima laot mengumpulkan data anak nelayan yang menerima beasiswa. Dalam rapat ini membahas tentang kuota anak nelayan, untuk tahun ini misalnya Aceh Besar mendapatkan kuota 200 orang atau 250 orang kita panggil panglima laot kabupaten/kota semuanya untuk kita bagikan kuotanya SD sekian, perguruan tinggi sekian, smp sekian dan SMA juga sekian. Setelah kita kasih kuota untuk panglima laot mereka membawa pulang dengan kita kasih tau bahwa pak anda bawa pulang kuotanya anda bagi ke lhok maseng-maseng berapa lhok di kampu anda? Misalnya Aceh Besar ada 14 lhok dia panggil panglima laot lhok maka buat musyawarah uang musyawarah kita kasih. Uang transport untuk setiap lhok ini kita kasih misalnya 100 ribu. Mereka buat acara di Kabupaten dibagi kuotanya menurut musyawarah, misalnya Lhoong mendapat 20 orang dan sudah diterapkan juga untuk

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

*setiap Kabupaten/Kota dananya tidak boleh lebih kaco anggaran lah kalau lebih. Baru setelah itu panglima laot lhok mencari anak-anak nelayan dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan”.*⁴⁶

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan YPMAN mengadakan rapat evaluasi dalam setahun sekali. Dalam rapat yang dihadiri oleh perwakilan setia panglima laot Kabupaten/Kota yang membahas tentang kuota yang akan diberikan untuk setiap Kabupaten/Kota serta berapa dana yang dialokasikan untuk setiap Kabupaten/Kota. Selain itu rapat evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan beasiswa ini serta mencari solusi terbaik untuk pengelolaan di masa yang akan datang. Sekretaris YPMAN juga mengatakan hal yang sama bahwa:

*“ Dalam rapat ini kami akan melihat apakah anak-anak yang diberikan beasiswa ini nilainya turun atau naik, makanya kami minta foto copy raport untuk mengevaluasi setelah diberikan beasiswa apakah anak ini rajin belajar atau tidak, kalo gak rajin belajar nilainya semakin menurun nanti kami cabut beasiswa dan anak ini tidak kami input datanya dan dana nya juga tidak bisa cair”.*⁴⁷

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan oleh YPMAN sudah dikelola dengan baik, hal ini dapat kita lihat dari pemaparan hasil wawancara dengan sekretaris yayasan serta dengan panglima laot lhok di Kecamatan Lhoong dan masyarakat gampong Saney yang mendapatkan beasiswa dan yang pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya, hal ini sejalan apa yang di sampaikan di pusat hingga sampai ke desa pengelolaannya sudah sesuai dengan prosedur yang di telah ditetapkan dan disepakati oleh seluruh panglima laot lhok se-Aceh.

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

4.1.1.7 Pengelolaan Keuangan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Pengelolaan keuangan merupakan suatu proses pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan sehingga sumber daya yang dikeluarkan bisa dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan terutama terkait pengelolaan dana beasiswa. Pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan tidak heran banyak anak yang putus sekolah karena orang tuanya tak sanggup membiayai pendidikannya karena uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup tanpa uang. Dengan adanya penyaluran beasiswa oleh YPMAN ini diharapkan dapat membantu anak-anak nelayan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat membantu meringankan beban orang tua serta membantu meningkatkan perekonomian para nelayan.

Sebuah instansi/organisasi tentunya tidak bisa berjalan tanpa ada dana/uang begitu juga dengan yayasan ini, Sejak pendirian YPMAN hingga 31 Desember 2016 dana Abadi YPMAN bersumber dari :

1. Hibah dari pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp.11.900.000.000. yang diterima pada tahun 2002
2. Hibah dari pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp. 46.707.100.000 yang diterima pada tahun 2007
3. Dana sumbangan berasal dari mahasiswa Inggris 6.906.093,- pada tahun 2008
4. Penambahan dana Abadi dari pengalokasian perolehan pendapatan sejumlah Rp. 12.364.726.036,-

Dengan dana yang begitu banyak sangat disayangkan apabila pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya prinsip transparansi saja yang menjadi prinsip utama dalam melihat kualitas pengelolaan keuangan akan tetapi

terdapat beberapa indikator lain yang wajib ada dalam setiap pengelolaan keuangan. dapat kita ambil pedoman dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara:

1. Tertib

Secara tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat di pertanggung jawabkan. Berdasarkan penguraian sumber dana beasiswa anak nelayan sebagaimana telah peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa total aset bersih per 31 Desember 2016 berjumlah Rp.68.978.732.129,-. Laporan keuangan YPMAN setiap tahun dilakukan audit oleh akuntan publik independen dengan opini wajar tanpa pengecualian mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun buku 2016. Dalam sejarah berdirinya YPMAN hingga sekarang belum ditemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari sekretaris umum YPMAN :

*“ Beasiswa ini di audit oleh akuntan publik, kami menyerahkan data nya dan mereka yang periksa, selain itu juga ada dewan pengawas untuk mengawasi berjalannya pengelolaan beasiswa ini, jadi dikelola dengan baik, semuanya terbuka kecuali ada beberapa informasi yang tidak bisa kami publikasi kepada pihak luar karna ”.*⁴⁸

Akuntan publik adalah akuntan yang sudah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Dalam hal ini akuntan publik memiliki tugas sebagai pemeriksa dan menganalisa laporan keuangan, audit laporan keuangan, audit pajak dan sebagainya, akuntan publik harus independen untuk menjaga kualitas audit keuangan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan dan juga standar pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

pengelolaan beasiswa anak nelayan oleh YPMAN telah dilakukan Secara tertib dimana keuangannya dikelola secara tepat waktu dan tepat guna karena diaudit oleh akuntan publik.

2. Taat Kepada Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan cara taat pada peraturan perundang-undangan, diwajibkan bagi setiap instansi/organisasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai sekretaris YPMAN yang menyatakan bahwa:

“Karena YPMAN ini merupakan organisasi sektor publik tentunya dalam pengelolaan dananya juga harus sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan. Uangnya harus dikelola dengan baik supaya tepat sasaran”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan beasiswa ini berpedoman pada undang-undang yang mengatur tentang tata kelola keuangan instansi-organisasi sektor publik, berdasarkan pemaparan peneliti sebelumnya terkait pengelolaan dana beasiswa diaman pengelolaan beasiswa anak nelayan ini Selain berpedoman pada standar audit yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompeten, kerahasiaan dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan auditor saat mengaudit laporan keuangan publik, dikeluarkanlah peraturan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) No.17/PMK.01/2008 sebagai pijakan atau landasan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sekretaris YPMAN bahwasannya:

“Laporan keuangan YPMAN setiap tahun diaudit oleh akuntan publik mulai dari tahun 2002 sampai sekarang, karena diaudit oleh akuntan publik dengan standar yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Keuangan jadi tidak perlu diragukan lagi, karena kalau ada kesalahan atau penyimpangan pasti akan

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Miftachhuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

diproses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”⁵⁰.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan oleh YPMAN telah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang taat kepada Peraturan Perundang-Undangan.

3. Efektif dan Efisien

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan pemasukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana beasiswa sudah dikelola dengan efektif dan efisien peneliti telah mewawancarai sekretaris YPMAN yang menyatakan bahwa :

“Untuk mengetahui capaian hasil program setiap tahunnya, kami melakukan rapat evaluasi setiap akhir tahun yang diikuti oleh setiap perwakilan panglima laot di masing-masing kabupaten yang ada di Aceh. Dalam pertemuan ini kami mengevaluasi hasil capaian program selama satu tahun kebelakang dan menentukan kuota beasiswa untuk satu tahun mendatang”⁵¹.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya rapat evaluasi tahunan ini bisa menjadi sebagai wadah dalam menganalisis capaian hasil program selama satu tahun kebelakang. Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait efisiensi dan efektifitas program beasiswa anak nelayan ini peneliti menyimpulkan bahwa program ini sudah tepat sasaran hal ini sejalan dengan tujuan pemberian beasiswa ini adalah untuk membantu masyarakat nelayan yang kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya dan dalam pengelolaan beasiswa ini juga sudah cukup bagus sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya di atas.

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

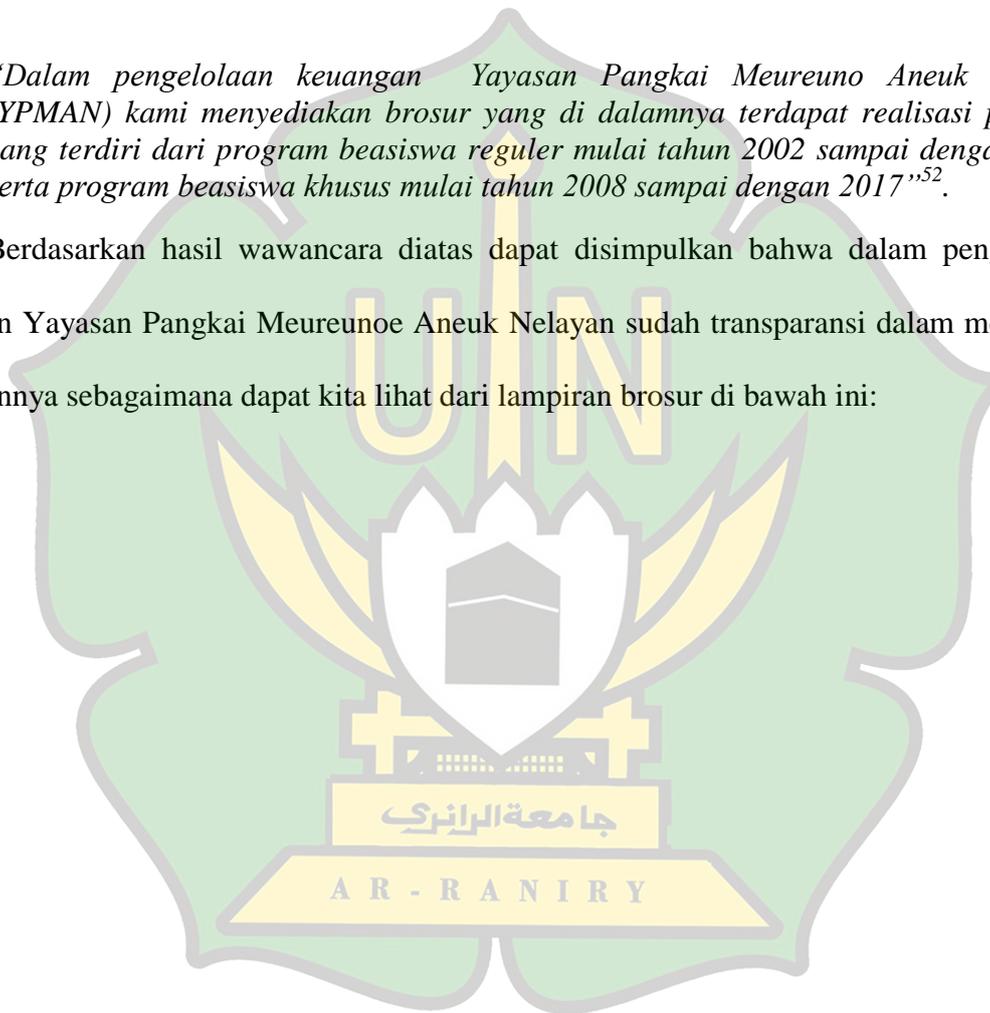
⁵¹ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

4. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Mengenai pengelolaan beasiswa anak nelayan pihak YPMAN membuat brosur sebagai media dalam mempublikasi informasi terkait realisasi program dan sumber keuangannya. Hal ini juga dijelaskan oleh sekretaris YPMAN bahwasannya:

“Dalam pengelolaan keuangan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) kami menyediakan brosur yang di dalamnya terdapat realisasi program yang terdiri dari program beasiswa reguler mulai tahun 2002 sampai dengan 2017, serta program beasiswa khusus mulai tahun 2008 sampai dengan 2017”⁵².

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan sudah transparansi dalam mengelola keuangannya sebagaimana dapat kita lihat dari lampiran brosur di bawah ini:



⁵² Wawancara dengan bapak Miftachhuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021



Keuangan

Sejak pendirian YPMAN hingga 31 Desember 2016 Dana Abadi YPMAN berasal dari:

1. Hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp. 11.900.000.000 (sebelas milyar, sembilan ratus juta rupiah) yang diterima pada tahun 2002.
2. Hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp. 44.707.100.000 (empat puluh empat milyar tujuh ratus tujuh juta seratus ribu rupiah) yang diterima pada tahun 2007
3. Dana sumbangan berasal dari Mahasiswa Inggris Rp. 6.906.093 (enam juta sembilan ratus enam sembilan puluh tiga rupiah) yang diterima pada tahun 2008.
4. Penambahan dana abadi dari pengalokasian perolehan pendapatan sejumlah Rp. 12.364.726.036,- (dua belas milyar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah).

Total aset bersih per 31 Desember 2016 berjumlah Rp. 68.978.732.129,- (enam puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)

Laporan keuangan YPMAN setiap tahun dilakukan audit oleh Akuntan Publik Independen dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian mulai dari tahun buku 2002 sampai dengan tahun buku 2016.



Jalan T. Nyak Arif No. 25-26 A
Pasar Lamnyong Banda Aceh, 23111
Telp./Fax: +62 0651 7553008

Email: ypmanaceh@yahoo.com

Bank: Mandiri Cab. Banda Aceh: 158-00-0933933-4

Contact Person: H. T. Bustamam (HP: 0811683995)

Miftachuddin Cut Adek (HP: 085277341660)

Legalitas Organisasi

Yayasan Pangkai Meurunoë Aneuk Nelayan (YPMAN) Aceh merupakan salah satu badan otonom dibawah Lembaga Hukum Adat Laot /Panglima Laot Aceh. YPMAN didirikan oleh Panglima Laot Aceh pada tahun 2001 dengan Akte Notaris Nomor 62 Tanggal 28 November 2001.

Menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 akta ini kemudian diubah dengan Akta Pendirian Nomor 61 Tanggal 29 Agustus 2007 yang seterusnya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU 3108.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 15 Juli 2008 dan telah diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 1 September 2009 Nomor 70. Untuk kelengkapan administrasi YPMAN telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.418.790.8-101.000

Realisasi Program

Sesuai dengan tujuan utama pendirian YPMAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak nelayan maka fokus kegiatan YPMAN adalah menyalurkan beasiswa kepada anak nelayan miskin di Aceh yang terdiri dari:

1. Program Beasiswa Reguler Mulai Tahun 2002 s/d 2017:

No	STRATA PENDIDIKAN	PENERIMA	DANA DISALURKAN
1	SD/MI/Sederajat	12,647	8,530,320,000
2	SM/PM/TA/Pesantren/Sederajat	8,889	8,045,040,000
3	SM/IMA/SMK/Pesantren/Sederajat	6,278	7,151,880,000
4	Perguruan Tinggi (Akademik, Universitas & Pesantren)	3,086	5,269,800,000
Jumlah		30,900	28,997,040,000

2. Program Beasiswa Khusus Mulai Tahun 2008 s/d 2017:

Strata Pendidikan	Tahun Ajaran			Jumlah Penerima Realisasi	Dana Tersalurkan
	2008 s/d 2015	2015/2016	2016/2017		
SUPM Ledong	393	94	103	590	2,821,085,500
STP Nag. Jakarta	20	8	8	36	738,882,000
Skripsi & Thesis	21	4	4	29	40,450,000
Hafiz/Hafzah	3	4	4	11	71,590,000
Pelatihan	97	-	-	97	415,355,000
Jumlah realisasi	534	110	119	763	3,586,902,500



Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si

SUSUNAN PENGURUS YPMAN PERIODE 2017 - 2022

Susunan Dewan Pembina

Ketua : Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, M.Si
 Anggota : Ir. Sarwono Kusumaatmadja
 Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Humam Hamid, MA
 Prof. H. Dahlan, SH, MH
 Dr. H. Nazamudin, MA
 H. Murhaban Makam
 Dr. Muhammad Adli Abdullah, SH., MCL

Susunan Pengurus Harian Periode 2012 – 2017

Ketua Umum : H. T. Bustamam
 Ketua : H. Musfiari Haridhi, SE, MBA
 Sekretaris Umum : Miftachuddin Cut Adek, SE, M.Si
 Sekretaris : T. Faisal, SE
 Bendahara Umum : H. Achmad Abdul Djallil, SE
 Bendahara : T. Mahzursyah

Susunan Pengawas Periode 2012 – 2017

Ketua : Ir. H. T. Said Mustafa, M.Si
 Anggota : DR. H. Ridwan Ibrahim, SE, MM, CA
 H. Muhammad Djakfar Karim



Ir. Sarwono Kusumaatmadja

Gambar 4.1 Brosur Beasiswa Anak Nelayan YPMAN

Sumber: Yayasan Pangkai Meureunoë Aneuk Nelayan (YPMAN), 2021

Berdasarkan dari gambar brosur di atas kita dapat mengetahui secara jelas terkait sumber keuangan YPMAN mulai sejak pendirian hingga Desember 2016 selain itu di dalam brosur ini juga terdapat informasi terkait realisasi program sesuai dengan tujuan utama pendirian YPMAN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak nelayan.

Selain menyediakan informasi seperti melalui brosur diatas sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan juga perlu menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh para manajemen yang berkepentingan dan masyarakat oleh karena itu dalam pengelolaan keuangannya YPMAN melakukan audit akuntansi publik sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka terhadap pengelolaan beasiswa yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan beasiswa anak nelayan YPMAN sudah transparan hal ini dapat kita lihat pada brosur yang telah di sediakan namun sayangnya brosur ini tidak diperbaharui sehingga informasi yang disajikan di dalamnya kurang lengkap.

5. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak YPMAN juga melakukan audit akuntans publik supaya bisa di akses oleh masyarakat dalam bentuk perwujudan dari pertanggung jawaban pihak yayasan kepada publik. Terkait pertanggungjawaban dalam pengelolaan beasiswa ini peneliti mewawancarai sekretaris YPMAN bahwasannya:

“Beasiswa ini di audit oleh akuntan publik, kami menyerahkan data nya dan mereka yang periksa, selain itu juga ada dewan pengawas untuk mengawasi berjalannya

pengelolaan beasiswa ini, jadi dikelola dengan baik, semuanya terbuka kecuali ada beberapa informasi yang tidak bisa kami publikasi kepada pihak luar”⁵³.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa laporan keuangan yayasan ini selain di audit oleh akuntan publik juga ada dewan pengawas yang melakukan pemeriksaan dokumen keuangan dalam setahun sekali dan setelah penyaluran beasiswa di setiap tahunnya mereka juga menyerahkan laporan keuangan kepada dewan pengawas yayasan untuk di periksa, laporan keuangan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait pengelolaan Keuangan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yayasan ini sudah dilakukan dengan baik sudah memenuhi beberapa indikator terkait pengelolaan keuangan yang terdiri dari: tertib, Taat Kepada Peraturan Perundang-Undangan, Efektif dan efisien, Transparan, dan Bertanggung Jawab. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peneliti merasa bahwa regulasi ini sudah tepat digunakan dalam melihat bagaimana pengelolaan keuangan Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN) karena yayasan ini termasuk kedalam organisasi sektor publik.

4.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa, penerapan prinsip Transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, antara lain sebagai berikut:

⁵³ Wawancara dengan bapak Miftachhuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN di kantor YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang pada dasarnya memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mengakses informasi, dengan adanya Transparansi diharapkan dapat menjamin kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan serta proses pembuatan kebijakan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menerangkan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada masyarakat berdasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau sehingga dapat menjadi salah satu sarana dalam mengurangi kecurangan berupa tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

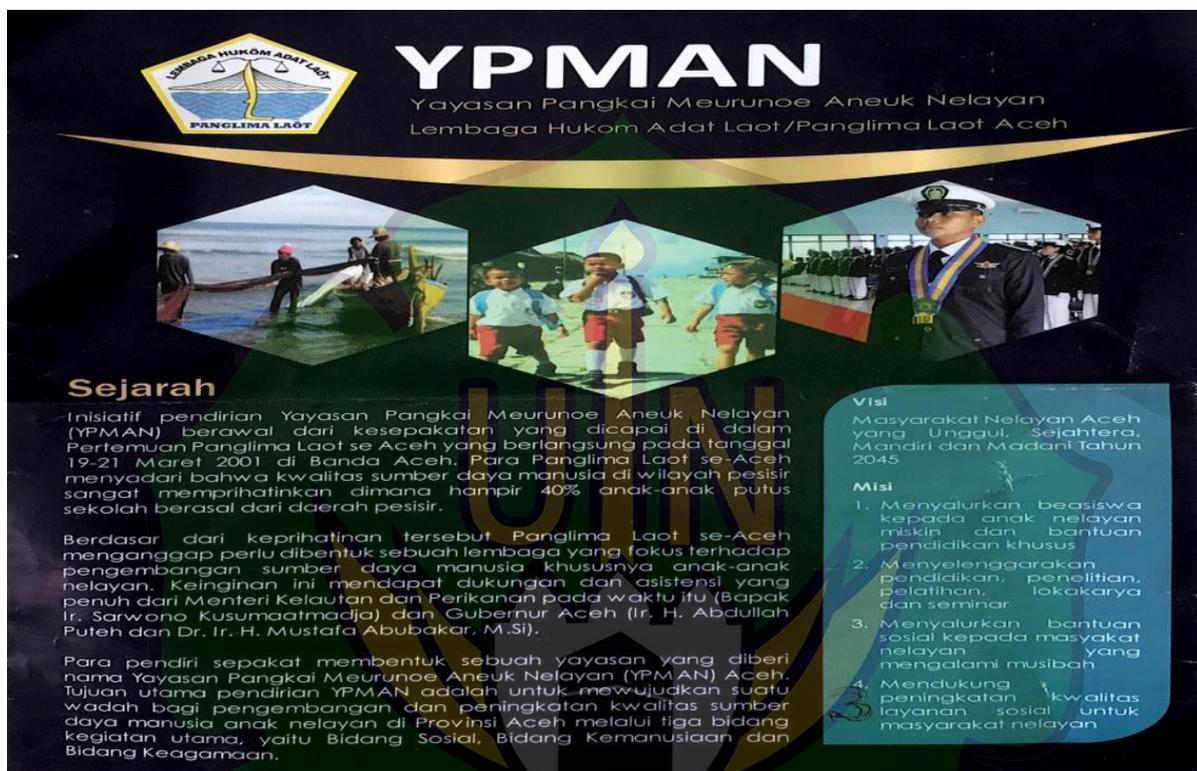
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator transparansi menurut Krina adalah sebagai berikut ini:

4.1.2.1 Penyediaan Informasi yang Jelas

Kejelasan dalam penyediaan informasi merupakan keharusan yang harus dipenuhi dalam penerapan prinsip transparansi pengelolaan keuangan. Penyediaan informasi yang jelas bisa dilihat melalui publikasi kebijakan publik melalui alat komunikasi. Dalam mempublikasi informasi menyangkut beasiswa anak nelayan YPMAN menyediakan brosur sebagai alat dalam menyediakan informasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari sekretaris YPMAN bahwa:

“kami ada menyediakan brosur, semua datanya bisa dilihat di sana tapi ini brosur lama data yang ada di dalam nya sampai tahun 2017 saja, belum di buat yang baru”.⁵⁴

Meskipun data yang tersedia di dalam brosur tersebut dari tahun 2002 hingga tahun 2017 setidaknya sudah ada inisiatif dari pihak YPMAN untuk membuat brosur sebagai alat dalam menyediakan informasi.



Gambar 4.2 Brosur Beasiswa Anak Nelayan YPMAN

Sumber: Yayasan Pangkai Meureunoe Aneuk Nelayan (YPMAN), 2021

Namun terkait brosur ini peneliti telah mewawancarai panglima laot lhok Saney yang menyatakan bahwa:

“ Mungkin brosur nya ada tapi belum sampai kepada saya, jika ada pasti sudah saya bagikan, kami panglima laot lhok menjalankan tugas sebagaimana yang diperintahkan oleh panglima laot Kabupaten ”.⁵⁵

Selain itu peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Saney untuk mengetahui apakah brosur ini telah sampai di tangan masyarakat atau belum:

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Thamrin Usman pada tanggal 09 Januari 2021

“Kami tidak tau kalau ada brosur atau sebagainya terkait informasi beasiswa ini karena selama ini kami mendapatkan informasi apapun melalui panglima laot langsung dan panglima laot tidak memberi brosur ini kepada kami”.⁵⁶

Ibu Khatijah selaku penerima beasiswa anak nelayan juga mengatakan bahwa:

“Saya sudah sangat lama menerima beasiswa ini, mungkin sekitar 10 lebih tapi memang tidak ada brosur yang diberikan karena terkait informasi beasiswa ini langsung panglima laot yang memberitahukan kepada saya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa brosur ini tidak sampai ke tangan masyarakat langsung dan masyarakat tidak tahu bahwa ada brosur YPMAN terkait beasiswa anak nelayan.

Akan tetapi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan menyangkut informasi yang diberikan oleh sekretaris YPMAN kepada peneliti saat peneliti melakukan wawancara di kantor YPMAN beberapa waktu silam sudah cukup jelas terkait bagaimana proses pembentukan YPMAN hingga bagaimana proses penyaluran beasiswa anak nelayan. Begitu juga dengan panglima Laot Lhok di Kecamatan Lhoong informasi yang disampaikan Kepada peneliti juga selaras dengan yang telah dijelaskan oleh sekretaris YPMAN hal ini terkait bagaimana sejarah pembentukan YPMAN, sumber dana hibah, tugas dan fungsi panglima laot, serta bagaimana proses penyaluran beasiswa ini. Untuk memastikan bahwa informasi ini apakah sudah sampai kepada masyarakat seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, terkait hal ini peneliti mewawancarai salah seorang masyarakat Desa Saney :

“Kalau tentang berkas apa saja yang harus kami berikan untuk panglima laot sudah jelas dikatakan langsung oleh panglima laot kepada saya”.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh panglima laot lhok kepada masyarakat Desa Saney sudah sangat jelas, terutama mengenai berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan untuk kemudian didata untuk penyaluran beasiswa. Namun terkait bagaimana proses pembentukan YPMAN atau sumber-sumber dana hibah dan terkait bagaimana proses penyaluran beasiswa ini masyarakat Desa

⁵⁶ Wawancara dengan ibu Salma pada Tanggal 16 Januari 2021

⁵⁷ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

Saney belum mengetahui secara jelas dan mendalam. Terkait hal ini peneliti telah mewawancarai salah seorang masyarakat Desa Saney yang juga sebagai penerima beasiswa ini:

*“Sejarah pembentukannya saya tidak tau, dari mana uang yang di kasih saya juga tidak terlalu mengerti yang saya tau beasiswa ini diberikan oleh panglima laot untuk anak-anak nelayan”.*⁵⁸

Kepala Desa saney selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat desa juga memiliki peran penting dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan di Desa Saney, terutama penyampaian pemberitahuan terkait beasiswa anak nelayan baik itu melalui panglima laot atau pihak YPMAN sendiri yang menyampaikannya kepada masyarakat Desa Saney Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar, panglima laot dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Terkait surat pemberitahuan dari panglima laot kepada kepala Desa Saney memang tidak ada tapi kepala desa tau bahwa beasiswa ini ada dan disalurkan dalam setiap tahunnya, dan terkait hal ini kami sendiri yang menyampaikan secara langsung kepada kepala Desa”.*⁵⁹

Terkait hal ini peneliti juga mewawancarai kepala Desa Saney, sesuai dengan hasil wawancara bersama kepala Desa Saney mengatakan bahwa:

*”Mengenai surat dari panglima laot atau dari YPMAN secara khusus tidak ada tapi panglima laot memberitahukan kepada kami tahu bahwa di Desa Saney ada beasiswa beasiswa anak nelayan yang diberikan khusus untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan”.*⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari kepala Desa Saney di atas dapat kita simpulkan bahwa panglima laot atau pihak YPMAN tidak memberikan surat khusus yang ditujukan untuk

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Thamrin Usman pada tanggal 09 Januari 2021

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Syarwanis selaku Kepala Desa Saney pada tanggal 9 Januari 2021

kepala Desa yang menjelaskan tentang beasiswa ini, namun kepala Desa Saney tahu bahwa beasiswa ini ada melalui panglima laot yang disampaikan secara langsung kepada beliau.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait penyediaan informasi yang jelas peneliti menyimpulkan bahwa Dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan menyangkut informasi yang diberikan oleh sekretaris YPMAN kepada peneliti saat peneliti melakukan wawancara di kantor YPMAN beberapa waktu silam sudah cukup jelas terkait bagaimana proses pembentukan YPMAN hingga bagaimana proses penyaluran beasiswa anak nelayan, Begitu juga dengan panglima laot lhok yang menjelaskan begitu detail terkait bagaimana proses penyaluran beasiswa ini. Namun terkait bagaimana proses pembentukan YPMAN atau sumber-sumber dana hibah dan terkait bagaimana proses penyaluran beasiswa ini masyarakat Desa Saney belum mengetahui secara jelas dan mendalam karena kurangnya informasi di Desa, walaupun ada penyediaan brosur oleh pihak YPMAN sebagai media penyampaian informasi akan tetapi brosur tersebut tidak sampai ke tangan masyarakat Desa Saney.

4.1.2.2 Kemudahan Akses Informasi.

Informasi yang disediakan selain harus jelas juga harus mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal penyediaan informasi publik sekarang sudah ada yang namanya website. Kinerja sebuah instansi bisa dinilai dari situs website yang dimiliki oleh instansi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2017 tentang penyelenggaraan portal dan situs web badan pemerintahan, sebagai bentuk dari penerapan E-government, optimalisasi pelayanan publik serta mempercepat penyampaian informasi menyangkut kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan oleh badan pemerintah.

Badan pemerintah merupakan unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik itu di lingkungan pemerintah maupun penyelenggaraan negara lainnya, situs web merupakan

kumpulan halaman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan dan informasi yang terdapat di dalamnya bisa di akses oleh seluruh masyarakat. Menyangkut website YPMAN Peneliti sudah mencoba menelusuri situs web yang di berikan oleh sekretaris umum YPMA pada saat wawancara tanggal 6 Januari 2021 lalu, akan tetapi alamat website yang diberikan tidak ditemukan/tidak dapat dijangkau. Hal ini berbanding terbalik dengan apa telah disampaikan oleh sekretaris YPMAN bahwasannya:

*“ Ada [www.panglima laot.org](http://www.panglima-laot.org) dibuat semenjak 2010. jadi di website itu tidak ada publikasi anggaran dia, cuma informasi terkait panglima laot, untuk YPMAN tidak ada web karena sudah web panglima laot dan itu sama saja”.*⁶¹

Berdasarkan pernyataan diatas yang disampaikan oleh sekretaris umum YPMAN bahwa lembaga adat panglima laot memiliki website yang digunakan untuk mempublikasi seluruh kegiatan dan informasi terkait proses pengelolaan beasiswa anak nelayan, namun saat peneliti mencoba mengakses website yang diberikan tidak terbaca halaman webnya. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa website ini sangat penting bagi sebuah instansi atau organisasi untuk mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat.

Mengingat bahwa tidak semua masyarakat di kampung tahu bagaimana cara menggunakan jaringan internet untuk mengakses informasi melalui website, selain itu untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi terkait beasiswa ini bisa juga di publikasi melalui surat edaran atau pengumuman yang di tempel di papan informasi di kantor desa sehingga semua masyarakat bisa melihat dan mengetahui informasi terkait beasiswa anak nelayan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Saney yang menyatakan bahwa:

“ Tidak ada pemberitahuan di papan informasi Desa atau surat edaran tentang beasiswa ini, biasanya sih itu ada ditempel surat pemberitahuan di pos jaga atau di

⁶¹ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

*kedai-kedai tapai terkait beasiswa ini tidak ada. Informasinya itu disampaikan secara langsung oleh panglima laot kalau ada yang dapat beasiswa, ketika anak saya mau di naikin data untuk dikasih beasiswa juga disampaikan secara langsung ke rumah saya ”.*⁶²

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang masyarakat Desa Saney, mengatakan hal yang sama yaitu:

*“Saya juga diberi tau secara langsung oleh panglima laot bahwa anak dan cucu saya dapat beasiswa panglima laot, cuma itu tidak ada pemberitahuan yang lain”.*⁶³

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Desa Saney tidak ada surat edaran khusus yang di publikasi kepada masyarakat Desa terkait informasi beasiswa anak nelayan, akan tetapi masyarakat tahu bahwa beasiswa ini ada di Desa Saney, panglima laot menyampaikan informasi secara langsung kepada masyarakat yang mendapatkan beasiswa anak nelayan, dan persyaratannya juga jelas apa-apa saja yang harus disiapkan oleh para nelayan Desa Saney untuk mendapatkan beasiswa. Namun alangkah baiknya jika beasiswa ini di publikasi di papan informasi Desa dan pos jaga, di warung-warung atau di tempat umum lainnya sehingga seluruh masyarakat bisa mengetahui informasi terkait beasiswa YPMAN di Desa Saney.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait kemudahan akses informasi peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan beasiswa anak nelayan dan susah mengakses informasi terkait beasiswa anak nelayan karena tidak ada media yang menyajikan informasi secara lengkap dan mendetail terkait pengelolaan beasiswa ini.

⁶² Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

⁶³ Wawancara dengan ibu Khatijah pada tanggal 16 Januari 2021

4.1.2.3 Menyusun Mekanisme Pengaduan

Penyusunan mekanisme pengaduan ini bertujuan untuk melaporkan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. Dalam penanganan keluhan, contohnya melalui berita-berita di media massa. Bisa di akses melalui website antaranews yang memposting beberapa informasi terkait YPMAN hal ini sesuai dengan pengalaman peneliti dimana peneliti pada awalnya mengetahui beberapa informasi terkait beasiswa anak nelayan dan YPMAN melalui media online dengan mengakses website antaranews. Selain itu keluhan juga dapat disampaikan melalui alamat email yang tertera di brosur yang tertuju langsung kepada YPMAN, akan tetapi di Desa Saney sesuai dengan hasil penelitian peneliti tidak menemukan adanya media terkait penanganan keluhan dari masyarakat, sebenarnya penanganan keluhan masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus disediakan dalam mewujudkan pengelolaan beasiswa yang transparan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa masyarakat Desa Saney terkait media penanganan keluhan:

*“Kami tidak tau mau menyampaikan keluhan kepada siapa dan melalui apa karena tidak ada tempat untuk kami sampaikan keluhan, padahal banyak yang ingin kami sampaikan terutama terkait bagaimana pengelolaan beasiswa ini”.*⁶⁴

*“Kami tidak tau mau menyampaikan keluhan bagaimana, palingan kami sesama penerima beasiswa bercerita sesama kami-kami saja karna tidak tau mau bilang ke siapa, kami segan sama panglima laot”.*⁶⁵

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti dapat menyimpulkan secara umum bahwa di Desa Saney masyarakat masih bingung untuk menyampaikan keluhan kepada siapa dan melalui apa. Hal ini tentunya berdampak kepada penerapan prinsip Transparansi yang belum sepenuhnya diterapkan karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sebenarnya terkait pengaduan masyarakat bisa langsung menyampaikan saran atau masukan melalui alamat email. Pak Miftah juga mengatakan bahwa YPMAN memiliki alamat email yaitu :

⁶⁴ Wawancara Dengan Ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

⁶⁵ Wawancara Dengan Ibu Khatijah pada tanggal 16 Januari 2021

yрманaceh@yahoo.com". Alamat Email ini juga tertera di brosur YPMAN sebagai sumber publikasi informasi kepada masyarakat terkait beasiswa anak nelayan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terkait penyusunan mekanisme pengaduan peneliti menyimpulkan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan terkait pengelolaan beasiswa anak nelayan bisa melalui alamat email yang sudah disediakan oleh YPMAN yaitu yрманaceh@yahoo.com. Akan tetapi masyarakat tidak tahu bahwa YPMAN ini punya alamat email karena email tersebut tertera di brosur dan brosurnya tidak sampai kepada masyarakat sehingga menghambat proses penyampaian informasi.

4.1.2.4 Meningkatkan Arus Informasi

Dalam meningkatkan informasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Untuk meningkatkan arus informasi YPMAN bekerjasama dengan antaranews dalam mempublikasi informasi mengenai YPMAN. Peneliti sudah mengakses informasi terkait YPMAN melalui www.antaraneews.com.

Untuk meningkatkan arus informasi selain bekerjasama dengan media massa, juga perlu adanya Pertemuan Masyarakat. Pertemuan dengan masyarakat merupakan suatu hal yang penting guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam penerapan sebuah kebijakan. Menyangkut beasiswa anak nelayan di Desa Saney belum ada pertemuan khusus yang dilakukan oleh panglima laot lhok secara khusus membahas tentang beasiswa anak nelayan. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat Desa Saney bahwa:

"Untuk rapat khusus tentang beasiswa anak nelayan ini tidak ada, dan surat edaran atau publikasi info juga tidak ada, saya tau beasiswa ini karena istri panglima laot langsung datang kerumah saya dan menyampaikan bahwa anak saya mau di naikin data untuk dapat beasiswa. Dan beliau mengatakan langsung kepada saya terkait berkas-berkas apa saja yang harus saya siapkan".⁶⁶

⁶⁶ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Saney tidak ada pertemuan masyarakat secara khusus membahas tentang beasiswa anak nelayan, masyarakat mengetahui informasi terkait beasiswa ini secara langsung disampaikan oleh panglima laot lhok di Desa Saney kepada masyarakat yang dinilai berhak mendapatkan beasiswa ini.

Selain pertemuan dengan masyarakat, mimbar rakyat merupakan suatu hal yang penting juga sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat, dalam pengelolaan beasiswa di Desa Saney peneliti tidak menemukan adanya mimbar rakyat atau hal serupa terkait beasiswa pengelolaan beasiswa ini⁶⁷.

Melalui beberapa indikator di atas dapat kita lihat bahwa Transparansi merupakan alat yang sangat penting sebagai perantara untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di daerah mereka sendiri. Terkait penerapan transparansi dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan belum diterapkan sepenuhnya, karena laman web yang diberikan oleh pihak YPMAN tidak bisa diakses seharusnya website ini menjadi jembatan bagi masyarakat dalam mengakses informasi terkait YPMAN selain itu website juga berguna untuk mempercepat penyampaian informasi melalui jaringan internet.

4.1.4 Harapan Segenap Stakeholder Yang Terlibat Dalam Beasiswa Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN)

Semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan mengharapkan yang terbaik dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan sesuai dengan visi dan misi YPMAN. Sekretaris YPMAN berharap bahwa:

⁶⁷ Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal 17.

*“Walaupun jumlah beasiswa yang diberikan tidak seberapa namun kita berharap beasiswa ini dapat bermanfaat dan dapat membantu anak nelayan supaya tidak ada yang putus sekolah lagi”.*⁶⁸

Panglima laot lhok Desa Saney juga mengungkapkan harapan yang sama:

*“ Semoga kedepannya kuota yang diberikan lebih banyak lagi sehingga banyak masyarakat yang bisa mendapatkannya, karena kalau kuota yang di kasih hanya sedikit takutnya akan menimbulkan kecemburuan, si A dapat kenapa si B tidak dapat padahal sama-sama anak nelayan, kita jadi serba salah padahal memang dari pusat sudah ditentukan berapa kuota dan anggaran dalam setiap tahunnya”.*⁶⁹

panglima laot lhok Mukim Glee Bruek sekaligus sebagai wakil Sekretaris panglima laot kabupaten Aceh Besar mengungkapkan harapannya bahwa:

*“Saya berharap beasiswa ini terus disalurkan karena beasiswa ini sangat dibutuhkan nelayan kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya, setidaknya ada keringanan dalam menyekolahkan anak jika ada beasiswa ini”.*⁷⁰

Begitu juga dengan kepala Desa Saney yang berharap bahwa:

*“Berharap kedepannya yang mendapatkan beasiswa ini lebih banyak, jadi merata dan semuanya mendapatkan tiska hanya anak nelayan saja tapi anak petani kurang mampu yang tinggal di pesisir laut juga bisa mendapatkan, karena banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga ada melaut”.*⁷¹

Selain itu, masyarakat penerima beasiswa juga mengungkapkan harapannya mengenai beasiswa anak nelayan :

*“Kami berharap beasiswa ini akan terus diberikan, karena kami merasa sangat terbantu dengan adanya beasiswa walaupun tidak seberapa banyak. Kami harap kedepannya bisa di tambah jumlah beasiswanya”.*⁷²

*“Saya harap beasiswa bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama karena beasiswa ini sangat membantu saya dalam membeli perlengkapan sekolah anak seperti beli sepatu, buku dan seragam sekolah”.*⁷³

“Saya sangat berharap pada panglima laot untuk terus memberikan beasiswa ini, kalian lihat sendiri kan saya membesarkan anak yatim dan yatim piatu. Dengan

⁶⁸ Wawancara dengan bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 januari 2021

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Thamrin Usman, panglima laot lhok Saney pada tanggal 9 Januari 2021

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Mahdi Muhammad Jamal panglima lhok Mukim Glee Bruek Pada tanggal 9 Januari 2021.

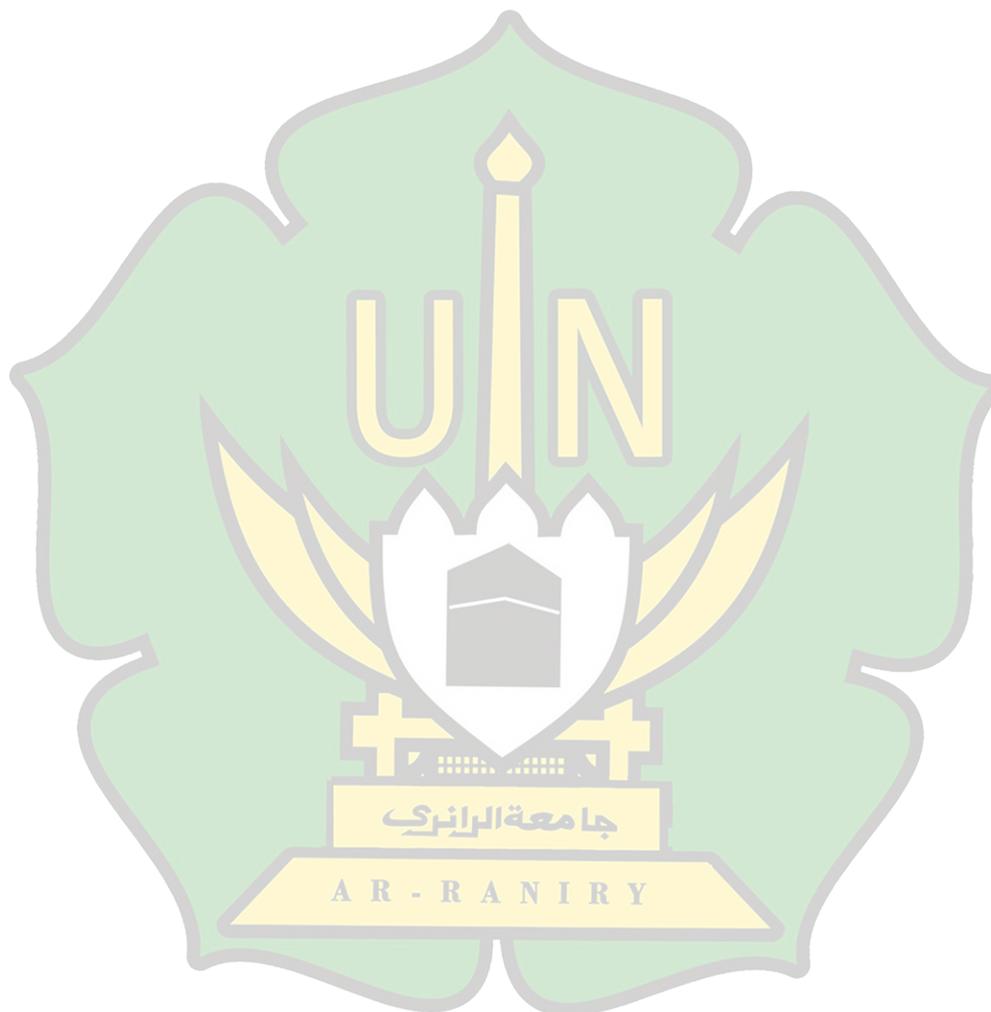
⁷¹ Wawancara dengan bapak Syarwanis selaku Kepala Desa Saney pada tanggal 9 Januari 2021

⁷² Wawancara dengan ibu Salma pada tanggal 16 Januari 2021

⁷³ Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

*adanya beasiswa ini saya merasa sangat terbantu dan meringankan beban saya dalam menyekolahkan anak dan cucu saya”.*⁷⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa ini berharap beasiswa dapat diberikan secara-terus menerus, karena sangat banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat nelayan salah satunya dapat membantu meringankan beban dalam menyekolahkan anak-anak mereka.



74

Wawancara dengan ibu Dewi pada tanggal 16 Januari 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1). Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar yaitu:

Dalam pengelolaannya beasiswa anak nelayan YPMAN sudah cukup bagus dijalankan sesuai dengan visi dan misinya untuk mewujudkan masyarakat nelayan Aceh yang unggul Sejahtera Mandiri dan Madani tahun 2045 dengan memberikan beasiswa untuk anak nelayan sebagai solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di masa yang akan datang. Prosedur dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan YPMAN dipaparkan dengan jelas oleh sekretaris YPMAN serta panglima laot lhok di Desa Saney.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa prosedur dalam penyaluran beasiswa YPMAN adalah sebagai berikut ini:

1. Setiap tahunnya pihak YPMAN meminta kepada panglima laot lhok di setiap kecamatan untuk mengirim data anak-anak nelayan yang berhak mendapatkan beasiswa dengan kuota yang telah ditentukan. Di Kecamatan Lhoong setiap tahunnya mendapatkan kuota 28 orang dimana kuota ini bisa berubah sesuai dengan hasil rapat tahunan panglima laot kabupaten, yang dibagikan secara bergiliran untuk setiap lhok dalam setahun.
2. Kemudian panglima laot lhok mendatangi keluarga nelayan untuk meminta

berkas-berkas persyaratan pendataan untuk mendapatkan beasiswa.

3. Berkas yang sudah dilengkapi kemudian diserahkan kepada panglima laot lhok, setelah itu panglima laot lhok menyerahkan data-data tersebut ke panglima kabupaten.
4. Setelah datanya terkumpul semua di kabupaten kemudian baru diantar oleh panglima laot kabupaten ke kantor YPMAN untuk di proses pencairan dana beasiswa selama setahun kedepan.

Melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa persyaratan sebagai penerima beasiswa anak nelayan adalah sebagai berikut ini :

1. Anak nelayan yang kurang mampu, layak atau tidaknya seorang anak mendapatkan beasiswa ini dinilai oleh panglima laot lhok yang ada di setiap lhok di Kecamatan tersebut.
 2. Selain anak nelayan, anak yatim dan anak petani kurang mampu yang tinggal di pinggir laut juga bisa mendapatkan beasiswa anak nelayan, hal ini berdasarkan keputusan dan kesepakatan panglima lhok yang ada di kecamatan tersebut.
- 2). Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar berdasarkan dengan hasil penelitian dan indikator yang digunakan dapat disimpulkan sebagai berikut:**

Peneliti menyimpulkan bahwa Penerapan prinsip transparansi di dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan YPMAN belum diterapkan sepenuhnya hal ini dikarenakan:

1. Berdasarkan penyediaan informasi yang jelas, belum sepenuhnya diterapkan dimana panglima laot atau pihak YPMAN tidak memberikan surat khusus yang ditujukan untuk kepala Desa yang menjelaskan tentang beasiswa ini.

2. Berdasarkan kemudahan mengakses informasi, tidak ada website panglima laot atau YPMA yang bisa diakses oleh masyarakat.
3. Untuk mengajukan pengaduan terhadap panglima laot bisa melalui alamat email.
4. Untuk meningkatkan arus informasi terkait YPMAN bisa di akses di www.antaraneews.co.id

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk pihak YPMAN harus lebih transparan dalam pengelolaan beasiswa anak nelayan.
2. Panglima laot harus membuat pertemuan masyarakat dan mimbar rakyat sebagai sarana menampung aspirasi masyarakat nelayan. Serta adanya surat edaran khusus yang dipublikasi di papan informasi Desa atau tempat-tempat umum yang ada di Desa.
3. Untuk masyarakat harus lebih peduli terhadap pengelolaan beasiswa anak nelayan ataupun pengelolaan lainnya yang ada di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Anggota IKAPI Jatim: Malang.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu: Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Aneka Cipta. Hlm 4
- Hani Handoko. 1984. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Dalam (digilib.uinsby.ac.id)
Diakses pada 18 November 2020 pukul 11:32 wib.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Salemba Humanika.
- J. Setiadi, Nugroho, SE., MM. 2003. *Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniasih, Erny. 2009. *Buku Pintar Beasiswa*. Jakarta: Gagas Media.
- Nugroho J. S. 2003. *Perilaku Konsumen*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uber. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

E-Jurnal:

Ariani, Dewi. "Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Di Indonesia". E-jurnal. Akses: uns.ac.id. pada 23 april 2020.

Logos. 2005. Jurnal: *Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi)*.(Hal. 24).

Muhammad, Hamid. 2003. Jurnal: "Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, lembaga penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia".(Hal. 31). Akses:<https://journal.umy.ac.id>. pada 30 Mei 2020.

Ningsih, Nurul Hutami dan Siwi , Nadia Yulianti. 2019."Pengaruh Partisipasi Komite Sekolah Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (Rapbs) Pada Sekolah Dasar Se-Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang".E-jurnal Akuntanika, vol.5, no.2,

Setyawan, M. Hidayat Dwi. 2015."Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Guru SMPN 3 Mertoyudan Magelang)

Solihat dan Sugiharto. 2009. "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan terhadap Partisipasi Orangtua Murid di SMA Negeri 107 Jakarta". Jurnal Ekonomi Bisnis No.2.

Windarti. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada SMA Dan SMK Negeri Di Kota Madiun". Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, Vol.4 No.1, April, (hal.23-36).

Artikel/Website Resmi Pemerintah:

Acehbesarkab.bps.go.id di akses pada 25 Januari 2021 pukul 22:20 WIB

<https://keuanganlsm.com/belajar-tentang-dana-abadi-dari-panglima-laot-aceh/>. Di akses pada 20 November 2020, jam 22:47 wib.

<https://aceh.antaranews>, YPMA Salurkan beasiswa untuk 33.653 anak nelayan Aceh, di akses pada 5 April 2020 pukul 14.22 WIB.

https://www.kpk.go.id/images/pdf/pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf diakses pada 19 Novemvber 2020 pukul 10:00wib

kebudayaan.kemdikbud.go.id (bpnb aceh panglima laot yang mengatur adat melaut) diakses 11: 20 Wib Jumat 18 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Wawancara Dengan Informan:

Wawancara dengan Bapak Thamrin Usman, panglima laot lhok Saney pada tanggal 9 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Miftachuddin Cut Adek selaku sekretaris umum YPMAN pada tanggal 6 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Mahdi Muhammad Jamal panglima lhok Mukim Glee Bruek Pada tanggal 9 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Syarwanis selaku Kepala Desa Saney pada tanggal 9 Januari 2021

Wawancara dengan Bapak Yusmadi selaku mantan penerima beasiswa anak nelayan pada tanggal 16 Januari 2021

Wawancara dengan ibu Dewi selaku penerima beasiswa anak nelayan pada tanggal 16 Januari 2021

Wawancara dengan ibu Khatijah selaku penerima beasiswa anak nelayan pada tanggal 16 Januari 2021

Wawancara dengan ibu Salma selaku penerima beasiswa anak nelayan pada tanggal 16 Januari 2021

Wawancara dengan ibu Juariah selaku mantan penerima beasiswa anak nelayan pada tanggal 16 Januari 2021

DAFTAR LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mela Sari

Judul skripsi : Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

Informan : Ketua/Sekretaris YPMAN, Panglima Laot, Geuchik, Masyarakat Yang Mendapatkan Beasiswa Anak Nelayan

Fokus : Transparansi Dalam Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan YPMAN di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

A. ketua/Sekretaris YPMAN :

1. Bagaimana proses terbentuknya YPMAN ?
2. Dari mana saja sumber-sumber pemasukan YPMAN ?
3. Apa tujuan beasiswa anak nelayan ini ?
4. Apa ada website yang bisa di akses oleh masyarakat untuk mengakses informasi terkait YPMAN ?
5. Apa legalitas pembentukan YPMA?
6. Kemana diserahkan laporan pertanggungjawaban keuangannya?
7. Bagaimana pengelolaan Beasiswa anak nelayan?
8. Apakah semua pelajar mendapatkan beasiswa yang jumlahnya sama? Atau berbeda-beda sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh?
9. Siapa saja stakeholder dalam pengelolaan beasiswa ini?
10. Apa saja persyaratan dalam mengurus beasiswa anak nelayan? Kriteria anak nelayan yang seperti apa yg bisa mendapatkan beasiswa ini?
11. Bagaimana prosedur dalam pengelolaan beasiswa ini di YPMAN ?
12. Apakah ada rapat evaluasi perbulan/pertahun mengenai pengelolaan keuangan dan penyaluran beasiswa ini?

B. Panglima Laot :

1. Apa saja tanggung jawab dan wewenang panglima laot dalam penyaluran beasiswa anak nelayan?

2. Apakah ada surat edaran dari YPMAN mengenai bagaimana proses/prosedur pengurusan beasiswa ?
3. Bagaimana proses pendataan penerima beasiswa anak nelayan?
4. Menurut bapak apakah sejauh ini pengelolaan beasiswa ini sudah bagus?

C. Keuchik :

1. Apa saja wewenang dan tanggung jawab keuchik dalam pengelolaan beasiswa ini?
2. Apa ada surat/pemberitahuan dari panglima laot/YPMA mengenai beasiswa ini ?
3. Apa ada di publikasi/ pemberitahuan kepada masyarakat mengenai beasiswa ini?

D. Masyarakat yang Mendapatkan Beasiswa Anak Nelayan :

1. Bagaimana proses dalam mengurus beasiswa ini?
2. Apa-apa saja persyaratannya ?
3. Prosedur apa saja yang harus diikuti ?
4. Apa ada kendala yang dihadapi saat mengurus beasiswa ini?
5. Sudah berapa lama mendapatkan beasiswa ini?
6. Berapa jumlah uang yang diberikan setiap bulannya?
7. Apakah beasiswa ini membantu meringan beban bapak/ibu dalam membiayai sekolah anak?

E. Masyarakat Nelayan yang Tidak Mendapatkan Beasiswa

1. Apa anda atau apa itu beasiswa anak nelayan ?
2. apakah sebelumnya anda pernah mendapatkan beasiswa anak nelayan?
3. Berapa lama anda mendapatkan beasiswa ini?
3. apa saja persyaratan dalam mengurus beasiswa ini?
4. kenapa anda tidak mendapatkan lagi beasiswa ini?
5. apa harapan anda terkait beasiswa ini kedepannya?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan sekretaris YPMAN:



Wawancara dengan panglima laot lhok mukim Glee Bruek:



Wawancara dengan panglima laot lhok
Mukim Lhoong:



Wawancara dengan masyarakat Desa Saney:



